



**LAPORAN PRAKTIKUM LABORATORIUM**  
**PROGRAM STUDI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL**

**PEMBIMBING :**

**Drs. Dede Kuswanda, Ph.D**

**Oleh :**

**Lulu Rafiq Asqia**

**NRP. 20.03.036**

**POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL**

**BANDUNG**

**2023**

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul : LAPORAN PRAKTIKUM LABORATORIUM  
PROGRAM STUDI PERLINDUNGAN DAN  
PEMBERDAYAAN SOSIAL

Nama Mahasiswa : Lulu Rafiq Asqia

NRP : 2003036

Program : Program Studi Perlindungan dan  
Pemberdayaan Sosial Program Sarjana  
Terapan

Pembimbing :

  
Drs. Dede Kuswanda, Ph.D

Mengetahui :

Ketua Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial  
Program Sarjana Terapan



  
Lina Favourita Sutia Putri, Ph.D

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur praktikan panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan kelancaran dalam menyelesaikan Laporan Praktikum Laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial yang dilaksanakan di Kelurahan Cimincrang, Kota Bandung yang dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2022 hingga 15 April 2023.

Praktikan menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam laporan ini dan oleh sebabnya praktikan mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak supaya laporan yang disusun dapat lebih baik dan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. Dalam proses pelaksanaan praktikum hingga terselesaikannya laporan ini tidak lepas dari peran berbagai pihak yang telah memberikan bantuan. Oleh karena itu praktikan mengucapkan terima kasih kepada;

1. Dr. Marjuki, M.Sc, selaku Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.
2. Lina Favourita Sutiaputri, Ph.D selaku Ketua Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung
3. Dra. Atirista Nainggolan, MP selaku Ketua Laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.
4. Drs. Dede Kuswanda, Ph.D selaku Dosen Pembimbing Praktikum Laboratorium Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan arahan kepada praktikan dengan penuh kesabaran dan pengorbanan waktu selama kegiatan praktikum laboratorium.
5. Rekan-rekan anggota kelompok 10 yang memberikan dukungan dan dapat bekerjasama selama pelaksanaan praktikum laboratorium
6. Semua pihak yang membantu, mendukung, dan mendoakan terlaksananya kegiatan praktikum laboratorium.

Bandung, April 2023

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR MATRIKS.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
A Latar Belakang .....	1
B Tujuan Praktikum.....	1
C Manfaat praktikum laboratorium .....	2
D Peserta Praktikum.....	3
E Lokasi dan Waktu Praktikum.....	3
F Proses Praktikum.....	3
G Sistemakita Laporan.....	11
BAB II.....	13
PRAKTIKUM LABORATORIUM.....	13
A Profil Analisis Jaminan Sosial .....	13
B Profil Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial .....	26
C Profil Analisis Pemberdayaan Sosial.....	39
D Profil Analisis Penataan Lingkungan Sosial.....	51
E Profil Analisis Penanggulangan Bencana .....	61
BAB III.....	75
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....	75
A Kesimpulan.....	75
B Rekomendasi .....	77
DAFTAR PUSTAKA .....	78
LAMPIRAN.....	80

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Pohon masalah analisis jaminan sosial.....	17
Gambar 2.2	Pohon masalah analisis sumber dana bantuan sosial.....	31
Gambar 2.3	Pohon masalah analisis pemberdayaan sosial.....	43
Gambar 2.4	Pohon masalah analisis penataan lingkungan sosial.....	55
Gambar 2.5	Pohon masalah analisis penanggulangan bencana.....	65

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pemasukan dana paguyuban periode 2022.....	20
Tabel 2.2	Rencana anggaran biaya program bina paguyuban pada kegiatan penyusunan manajemen tata kelola program .....	22
Tabel 2.3	Rencana anggaran biaya program bina paguyuban pada kegiatan sosialisasi .....	23
Tabel 2.4	Alat penunjang program bina paguyuban.....	24
Tabel 2.5	Jadwal kegiatan penyusunan manajemen tata kelola program.	25
Tabel 2.6	Jadwal kegiatan sosialisasi kemanfaatan program paguyuban.	26
Tabel 2.7	Rencana biaya program pengembangan strategi kemitraan untuk swadaya lansia terlindungi .....	35
Tabel 2.8	Alat pendukung program pengembangan strategi kemitraan untuk swadaya lansia terlindungi .....	36
Tabel 2.9	Jadwal kegiatan sharring session program pengembangan strategi kemitraan untuk swadaya lansia terlindungi .....	38
Tabel 2.10	Rencana anggaran biaya program perempuan mandiri bersama melalui pembentukan koperasi untuk meningkatkan produktivitas perempuan .....	47
Tabel 2.11	Alat pendukung program perempuan mandiri bersama melalui pembentukan koperasi untuk meningkatkan produktivitas perempuan .....	48
Tabel 2.12	Jadwal pelatihan dan workshop dalam penentuan target pasar, jenis produk dan teknik pemasaran.....	51
tabel 2.13	rencana anggaran biaya program pembentukan wadah komunikasi rutin warga: rembug warga rutin sadayana (rembug warna)....	59
Tabel 2.14	Alat penunjang pelaksanaan program pembentukan wadah komunikasi rutin warga: rembug warga rutin sadayana (rembug warna).....	59
Tabel 2.15	Rencana anggaran biaya program sosialisasi dan pelatihan edukasi kebencanaan anak sigap dan tanggap bencana.....	69

Tabel 2.16	Alat penunjang program sosialisasi dan pelatihan edukasi kebencanaan anak sigap dan tanggap bencana.....	70
Tabel 2.17	Jadwal kegiatan sosialisasi serta pelatihan program sosialisasi dan pelatihan edukasi kebencanaan anak sigap dan tanggap bencana	73

## DAFTAR MATRIKS

Matriks 2.1	Analisis SWOT program bina paguyuban.....	24
Matriks 2.2	Analisis SWOT program pengembangan strategi kemitraan untuk swadaya lansia terlindungi .....	37
Matriks 2.3	Analisis SWOT program perempuan mandiri bersama melalui pembentukan koperasi untuk meningkatkan produktivitas perempuan .....	48
Matriks 2.4	Analisis SWOT program pembentukan wadah komunikasi rutin warga: rembug warga rutin sadayana (rembug warna) .....	60
Matriks 2.5	Analisis SWOT program sosialisasi dan pelatihan edukasi kebencanaan anak sigap dan tanggap bencana.....	71



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran. 1	Dokumentasi pelaksanaan bimbingan, pra lapangan dan supervisi	80
Lampiran. 2	Dokumentasi kegiatan pembekalan.....	82
Lampiran. 3	Dokumentasi kegiatan lapangan.....	84



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A Latar Belakang**

Proses pendidikan di Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung tidak hanya dilakukan melalui pembelajaran dalam kelas (classroom teaching), tetapi juga melalui praktikum laboratorium (laboratory practicum) indoor dan outdoor. Kegiatan praktikum menjadi wahana bagi mahasiswa untuk mengasah keterampilan-keterampilan dasar dan keterampilan-keterampilan khusus dalam proses intervensi pekerjaan sosial. Dengan demikian mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan dan keterampilan dalam praktik aras mikro, meso, dan makro, baik dalam bekerja dengan individu, kelompok, masyarakat, dan organisasi sosial. Praktikum Laboratorium di samping dilaksanakan dalam ruangan laboratorium, juga mahasiswa diberikan kesempatan melakukan aktivitas di masyarakat dan/atau organisasi sosial untuk memahami fenomena sosial yang berkembang di masyarakat.

Praktikum Laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial menjadi bagian penting dalam membentuk profil lulusan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial yaitu sebagai Analis Jaminan Sosial, Analis Sumber Dana Bantuan Sosial, Analis Pemberdayaan Sosial, Analis Penataan Lingkungan Sosial, dan Analis Penanggulangan Bencana. Melalui praktikum laboratorium, mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan keterampilan praktik intervensi pekerjaan sosial mulai proses awal hingga pengakhiran melalui aktivitas di dalam laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial. Demikian pula dalam praktikum ini dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengimplementasikan keterampilan dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial. Kegiatan praktikum laboratorium berfokus pada penguasaan keterampilan dasar dan keterampilan proses intervensi pekerjaan sosial dalam menangani permasalahan sosial di masyarakat dan organisasi sosial.

### **B Tujuan Praktikum**

Praktikum laboratorium bertujuan agar mahasiswa memiliki :

- 1 Sikap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; menghargai keanekaragaman budaya, perbedaan agama, kepercayaan, dan pendapat, serta temuan orisinal orang lain; memiliki kepekaan sosial, kepedulian, serta kerja sama dalam masyarakat dan lingkungan; taat hukum, jujur, teliti dan

disiplin dalam kehidupan bermasyarakat; menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian perlindungan dan pemberdayaan sosial secara mandiri; menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

- 2 Kemampuan untuk menerapkan pengetahuan, metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial.
- 3 Kemampuan untuk mengimplementasikan prinsip dan etika pekerjaan sosial dalam menerapkan metode dan teknik dalam praktik perlindungan dan pemberdayaan sosial.
- 4 Kemampuan untuk mempraktikkan keterampilan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial.
- 5 Memiliki keterampilan dalam melakukan proses intervensi pekerjaan sosial meliputi tahapan :
  - a Pendekatan Awal
  - b Asesmen
  - c Perencanaan Intervensi.

### **C Manfaat praktikum laboratorium**

- 1 Bagi Mahasiswa
  - a Terbentuknya sikap mahasiswa yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasar agama, moral, dan etika; menghargai keanekaragaman budaya, agama, kepercayaan, dan pendapat, serta temuan orisinil orang lain; memiliki kepekaan sosial, kepedulian, serta kerja sama dalam masyarakat dan lingkungan; taat hukum, jujur, teliti dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat; menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian perlindungan dan pemberdayaan sosial secara mandiri; menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan
  - b Meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam menerapkan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial
  - c Meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam mengimplementasikan prinsip dan etika pekerjaan sosial dalam menerapkan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial
  - d Meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam mempraktikkan keterampilan-keterampilan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial

- e Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan dan mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya secara nyata dalam praktik perlindungan dan pemberdayaan sosial.
  - f Mahasiswa memiliki keterampilan praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial yang meliputi tahapan : a. Pendekatan awal b. Asesmen c. Rencana Intervensi
- 2 Bagi Lembaga
- a Meningkatnya kualitas kurikulum Program Sarjana Terapan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung,
  - b Sebagai alat evaluasi untuk perbaikan kurikulum Program Sarjana Terapan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung

#### **D Peserta Praktikum**

Peserta Praktikum Laboratorium adalah mahasiswa Semester VI Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan yang telah mengontrak mata kuliah Praktikum Laboratorium dengan jumlah peserta praktikum sebanyak 91 orang yang terbagi kedalam 12 kelompok.

#### **E Lokasi dan Waktu Praktikum**

Lokasi praktikum di Kelurahan Cimincrang. Waktu pelaksanaan Praktikum Laboratorium sesuai dengan tahapan proses terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu :

- 1 Pra Lapangan
  - a Pembekalan : 25 Januari – 3 Februari 2023
  - b Pelepasan Praktikan : 3 Februari 2023
- 2 Lapangan (Indoor) : 6 Februari - 15 April 2023
- 3 Pasca Lapangan :
  - a Bimbingan penulisan laporan : 16 - 26 April 2023
  - b Pendaftaran ujian : 27 – 29 April 2023
  - c Ujian Lisan Praktikum : 1-2 Mei 2023
  - d Perbaikan dan penyerahan Laporan : 3 – 10 Mei 2023

#### **F Proses Praktikum**

Proses praktikum laboratorium dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pengakhiran.

- 1 Tahap Persiapan
 

Tahap persiapan merupakan tahap pra lapangan yang dilaksanakan

untuk menyiapkan praktikan dan dosen pembimbing praktikum dalam memahami kegiatan praktikum laboratorium. Tahap pra lapangan terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a Pembekalan Umum

Pembekalan umum dilaksanakan dengan pemberian materi oleh narasumber yang terdiri dari :

- 1) Pembekalan Profil Analisis Jaminan Sosial Ibu Gayatri waditra Nirwesti, ME. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI
- 2) Pembekalan Profil Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial Bapak Tonton Hartanto sebagai CSR Manager PT. Accor Asia Pasific Corporation Indonesia
- 3) Pembekalan Profil Analisis Pemberdayaan Sosial Bapak Samsul Maarif selaku Project Manager Yayasan Usaha Mulia
- 4) Pembekalan Profil Analisis Penataan Lingkungan Sosial oleh narasumber Bapak Ade Reno, AKS., MSW selaku CEO Islamic Relief Indonesia
- 5) Pembekalan Profil Analisis Penanggulangan Bencana oleh Bapak Mohd Robi Amri selaku Perencana Ahi Madya BNPB Jakarta

b Bimbingan pra lapangan oleh dosen pembimbing praktikum:

- 1) Review tentang materi pembekalan umum dan penugasan melalui Google Classroom
- 2) Bimbingan teori/konsep dan keterampilan yang akan diterapkan
- 3) Melakukan Praktik, demonstrasi, role playing tentang kegiatan dan teknologi Perlindungan dan pemberdayaan sosial dengan menggunakan data sekunder, dalam hal :
  - a) Mengenal populasi kelompok sasaran (population target group) dan lingkungan sosialnya.
  - b) Mengidentifikasi dan memahami program-program : Sistem Jaminan Sosial, Sumber Dana Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Penataan Lingkungan Sosial, Penanggulangan Bencana
  - c) Mempelajari isu-isu masalah perlindungan dan pemberdayaan sosial yang terkait dengan 5 (lima) profil Prodi Lindayasos.
  - d) Mengidentifikasi kebijakan dan program/kegiatan penanganan masalah Perlindungan dan Pemberdayaan sosial sesuai dengan 5 (lima) profil Prodi Lindayasos.
- 4) Membuat matriks rencana kerja dan desain teknologi yang sesuai dengan kegiatan praktikum laboratorium.

c Serah terima praktikan dari Prodi kepada Dosen Pembimbing

## Praktikum

Serah terima praktikan, dilaksanakan secara luring di Kampus Poltekesos yang dilakukan oleh Kaprodi Lindayasos kepada Dosen Poltekesos Bandung yang ditunjuk sebagai dosen pembimbing praktikum.

## 2 Tahap Lapangan

Tahap lapangan dilaksanakan dalam lima sesi sesuai profil lulusan Prodi Lindayasos yaitu praktik sebagai Analis Jaminan Sosial, Analis Sumber Dana Bantuan Sosial, Analis Pemberdayaan Sosial, Analis Penataan Lingkungan Sosial, dan Analis Penanggulangan Bencana. Setiap sesi dilaksanakan selama 14 hari kalender, dengan rician kegiatan sebagai berikut:

### a Peningkatan Kompetensi Analis Jaminan Sosial

1) Peningkatan Kompetensi Analis Jaminan Sosial oleh praktisi/pakar Membahas tentang pengalaman praktisi dalam mengelola pelaksanaan sistem jaminan sosial, yang meliputi:

- a) Berbagai isu dalam implementasi jaminan sosial.
- b) Model jaminan sosial yang digunakan.
- c) Keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam pengelolaan jaminan sosial.
- d) Merancang program jaminan sosial
- e) Melakukan analisis kelayakan rancangan program jaminan sosial
- f) Stakeholder terkait program jaminan sosial.

2) Peningkatan Kompetensi Analis Jaminan Sosial oleh dosen Prodi Lindayasos, dengan materi mengacu pada kompetensi profil Analis Jaminan Sosial, sebagai berikut:

#### a) Pengetahuan :

- (1) Mengetahui konsep teoritis kebutuhan dasar manusia
- (2) Memahami konsep masalah sosial dan masalah kesejahteraan sosial
- (3) Mengetahui konsep perlindungan dan jaminan sosial
- (4) Mengetahui konsep standar praktik pekerjaan sosial

#### b) Keterampilan :

- (1) Mampu melaksanakan intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk mencegah terjadinya disfungsi sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
- (2) Mampu menganalisis dan menyusun program perlindungan dan jaminan sosial untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat

agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

(3) Mampu menganalisis dan menyusun program bantuan sosial.

(4) Mampu menganalisis dan menyusun program advokasi sosial Mampu menganalisis dan menyusun program pemberian akses bantuan hukum.

3) Praktik Analisis Jaminan Sosial, meliputi :

a) Melakukan pendekatan awal untuk mengidentifikasi kasus-kasus atau masalah-masalah dalam pelaksanaan Jaminan Sosial.

b) Melakukan Asesmen, dengan menggunakan data sekunder.

c) Menyusun Rencana Intervensi sesuai dengan kasus/permasalahan yang dipilih oleh praktikan.

d) Menyusun laporan praktik analisis jaminan sosial.

b Peningkatan Kompetensi Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial

1) Peningkatan Kompetensi Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial oleh praktisi/industri Membahas tentang pengalaman praktisi dalam mengelola sumber dana bantuan sosial, yang meliputi:

a) Berbagai isu dalam implementasi sumber dana bantuan sosial,

b) Model sumber dana bantuan sosial, yang digunakan

c) Keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam pengelolaan sumber dana bantuan sosial,

d) Merancang program sumber dana bantuan sosial,

e) Melakukan analisis kelayakan rancangan program sumber dana bantuan sosial,

f) Stakeholder terkait program sumber dana bantuan sosial,

2) Peningkatan Kompetensi Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial oleh dosen Prodi Lindayasos yang ditugaskan, dengan materi mengacu pada kompetensi profil Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial, sebagai berikut:

a) Pengetahuan

(1) Menguasai konsep bantuan sosial dan jenisnya

(2) Menguasai konsep sumber dana bantuan sosial

(3) Menguasai konsep penggalangan dana dan prinsip-prinsip penggalangan sumber dana bantuan sosial

(4) Menguasai konsep perencanaan dalam penggalangan sumber dana bantuan sosial

(5) Menguasai konsep pelaksanaan dan kebijakan



- penggalangan sumber dana bantuan sosial
- (6) Menguasai konsep monitoring dan evaluasi dalam penggalangan sumber dana bantuan sosial
- b) Keterampilan
- (1) Mampu menganalisis dan menyusun program perencanaan dalam penggalangan dana dan pengelolaan dana bantuan sosial
  - (2) Mampu dalam menganalisis dan menyusun program pelaksanaan dalam penggalangan dana dan pengelolaan dana bantuan sosial.
  - (3) Mampu menganalisis dan menyusun program monitoring dan evaluasi dalam penggalangan dana dan pengelolaan dana bantuan sosial
  - (4) Mampu menganalisis dan menyusun sistem pelaporan dalam penggalangan dana dan pengelolaan dana bantuan sosial
  - (5) Mampu menganalisis dan menyusun sistem informasi dan komunikasi dalam penggalangan dana pengelolaan dana bantuan sosial
- 3) Praktik Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial, meliputi :
- a) Melakukan pendekatan awal untuk mengidentifikasi kasus-kasus/ masalah-masalah dalam pengelolaan sumber dana bantuan sosial
  - b) Melakukan Asesmen, dengan menggunakan data sekunder
  - c) Menyusun Rencana Intervensi
  - d) Menyusun laporan praktik analisis sumber dana bantuan sosial
- c) Peningkatan Kompetensi Analisis Pemberdayaan Sosial
- 1) Peningkatan Kompetensi Analisis Pemberdayaan Sosial oleh praktisi / industri Membahas tentang pengalaman praktisi dalam mengelola Pemberdayaan Sosial, yang meliputi:
    - a) Berbagai isu dalam implementasi pemberdayaan sosial,
    - b) Model pemberdayaan sosial, yang digunakan
    - c) Keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam Pemberdayaan Sosial,
    - d) Merancang program Pemberdayaan Sosial
    - e) Melakukan analisis kelayakan rancangan program Pemberdayaan Sosial
    - f) Stakeholder terkait program Pemberdayaan Sosial
  - 2) Peningkatan Kompetensi Analisis Pemberdayaan Sosial oleh dosen Prodi Lindayosos, dengan materi mengacu pada

kompetensi profil Analisis Pemberdayaan Sosial, sebagai berikut:

a) Pengetahuan

- (1) Menguasai Konsep kebutuhan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dalam pemberdayaan sosial
- (2) Menguasai Konsep dan teknologi pemberdayaan sosial
- (3) Menguasai Konsep sumber daya penyelenggaraan sosial dalam pemberdayaan sosial
- (4) Menguasai Konsep supervisi dalam program pemberdayaan sosial
- (5) Menguasai Konsep pendampingan sosial dan penguatan kelembagaan sosial dalam pemberdayaan sosial
- (6) Menguasai Konsep keserasian sosial dan pemasaran hasil usaha dalam pemberdayaan sosial.

b) Keterampilan

- (1) Mampu mengidentifikasi permasalahan dan sumber daya yang dapat dikembangkan dalam pemberdayaan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat
- (2) Mampu menganalisis dan menyusun program penumbuhan kesadaran dan pemberian motivasi dalam pemberdayaan sosial
- (3) Mampu menganalisis dan menyusun program pemberian keterampilan dalam pemberdayaan sosial
- (4) Mampu menganalisis dan menyusun program penguatan kelembagaan dalam masyarakat dalam pemberdayaan sosial
- (5) Mampu melaksanakan program pendampingan sosial untuk pemberdayaan sosial
- (6) Mampu menganalisis dan menyusun program kemitraan dan penggalangan dana untuk pemberdayaan sosial
- (7) Mampu melaksanakan pemberian akses terhadap stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha
- (8) Mampu melaksanakan peningkatan akses pemasaran hasil usaha
- (9) Mampu melaksanakan supervisi dan advokasi sosial dalam pemberdayaan sosial
- (10) Mampu menganalisis dan menyusun program keserasian sosial dan bimbingan lanjut dalam

pemberdayaan sosial

- 3) Praktik Analisis Pemberdayaan Sosial, meliputi :
  - (1) Melakukan pendekatan awal untuk mengidentifikasi kasus-kasus/ masalah-masalah dalam pelaksanaan pemberdayaan sosial
  - (2) Melakukan Asesmen, dengan menggunakan data sekunder
  - (3) Menyusun Rencana Intervensi
  - (4) Menyusun laporan praktik analisis pemberdayaan sosial

d Peningkatan Kompetensi Analisis Penataan Lingkungan Sosial

- 1) Peningkatan Kompetensi Analisis Penataan Lingkungan Sosial oleh praktisi/industri Membahas tentang pengalaman praktisi dalam mengelola Penataan Lingkungan Sosial, yang meliputi:
  - a) Berbagai isu dalam mengelola penataan lingkungan sosial
  - b) Model penataan lingkungan sosial yang digunakan
  - c) Keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam penataan lingkungan sosial
  - d) Merancang program penataan lingkungan sosial
  - e) Melakukan analisis kelayakan rancangan program penataan lingkungan sosial Stakeholder terkait program Penataan Lingkungan Sosial
- 2) Peningkatan Kompetensi Analisis penataan lingkungan sosial oleh dosen Prodi Lindayosos, dengan materi mengacu pada kompetensi profil Analisis Penataan Lingkungan Sosial, sebagai berikut:
  - a) Pengetahuan
    - (1) Menguasai Konsep ekologi manusia dalam lingkungan sosial
    - (2) Menguasai Konsep krisis lingkungan, konflik sosial, dan urbanisasi
    - (3) Menguasai Konsep degradasi lingkungan dan bencana alam
    - (4) Menguasai Konsep adaptasi ekologi manusia
    - (5) Menguasai Konsep interaksisosial-ekologi dalam suatu sistem sosial komunitas dan ekosistem
    - (6) Menguasai Konsep kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam
    - (7) Menguasai Konsep praktik pekerjaan sosial dalam penataan lingkungan sosial
  - b) Keterampilan
    - (1) Mampu menganalisis hubungan permasalahan

- lingkungan dengan munculnya masalah sosial
- (2) Mampu menganalisis dan menyusun program pengembangan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam
  - (3) Mampu menganalisis dan menyusun program penataan lingkungan sosial dalam peningkatan keberfungsian individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat
- 3) Praktik Analisis Penataan Lingkungan Sosial, meliputi :
- a) Melakukan pendekatan awal untuk mengidentifikasi kasus-kasus/ masalah-masalah dalam penataan lingkungan sosial
  - b) Assesmen dengan menggunakan data sekunder
  - c) Menyusun Rencana Intervensi
  - d) Menyusun laporan praktik Analisis Penataan Lingkungan Sosial
- e Peningkatan Kompetensi Analisis Penanggulangan Bencana
- 1) Peningkatan Kompetensi Analisis Penanggulangan Bencana oleh praktisi/industri Membahas tentang pengalaman praktisi dalam penanggulangan bencana, yang meliputi:
    - a) Berbagai isu dalam penanggulangan bencana
    - b) Model penanggulangan bencana yang digunakan
    - c) Keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam penanggulangan bencana
    - d) Merancang program penanggulangan bencana
    - e) Melakukan analisis kelayakan rancangan program penanggulangan bencana
    - f) Stakeholder terkait program penanggulangan bencana
  - 2) Peningkatan Kompetensi Analisis Penanggulangan Bencana oleh dosen yang ditugaskan, dengan materi mengacu pada kompetensi Profil Analisis Penanggulangan Bencana, sebagai berikut:
    - a) Pengetahuan
      - (1) Menguasai Konsep bencana alam dan non alam serta jenis-jenisnya
      - (2) Menguasai Konsep masalah bencana dan sistem penanggulangan bencana
      - (3) Menguasai Konsep mitigasi bencana, dan pengurangan risiko bencana.
      - (4) Menguasai Konsep perlindungan korban bencana pada saat status darurat bencana

- (5) Menguasai Konsep standar minimum pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana
- b) Keterampilan
  - (1) Mampu melaksanakan intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk pengurangan risiko bencana
  - (2) Mampu menganalisis dan menyusun program perlindungan korban pada saat status darurat bencana
  - (3) Mampu menganalisis pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana dan pengungsi
  - (4) Mampu menganalisis dan menyusun program pemberdayaan korban bencana pasca bencana
  - (5) Mampu menganalisis dan menyusun program pengembangan masyarakat resilien terhadap bencana
- 3) Praktik Analisis Penanggulangan Bencana, meliputi :
  - a) Melakukan pendekatan awal untuk mengidentifikasi kasus-kasus/ masalah-masalah dalam penanggulangan bencana
  - b) Melakukan Assesmen, dengan menggunakan data sekunder
  - c) Menyusun Rencana Intervensi
  - d) Menyusun laporan praktik penanggulangan bencana
- 3 Tahap Pasca Lapangan
  - a) Finalisasi penyusunan laporan akhir praktikum
  - b) Ujian Lisan Praktikum
  - c) Perbaikan dan penyerahan laporan

## **G Sistemakita Laporan**

### **KATA PENGANTAR**

### **DAFTAR ISI**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A Latar Belakang
- B Tujuan dan manfaat praktikum
- C Waktu dan lokasi praktikum
- D Proses praktikum
- E Sistematika laporan

### **BAB II PRAKTIKUM LABORATORIUM**

- A Profil Analisis Jaminan Sosial
- B Profil Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial
- C Profil Analisis Pemberdayaan Sosial

- D Profil Analisis Penataan Lingkungan Sosial
- E Profil Analisis Penanggulangan Bencana

### **BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

- A Kesimpulan
- B Rekomendasi

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **PRAKTIKUM LABORATORIUM**

#### **A Profil Analisis Jaminan Sosial**

##### **1 Gambaran Umum Masalah**

Isu kesejahteraan sosial tidak terlepas dari pengaruh globalisasi, akan halnya dengan globalisasi berpengaruh pada kehidupan ekonomi sehingga berdampak pada timbulnya masalah sosial berupa kesenjangan yang semakin tajam antara masyarakat yang dapat mengikuti arus globalisasi dimana mereka mampu memiliki penghasilan yang tinggi dan masyarakat yang tidak dapat mengikuti persaingan globalisasi dan tidak memiliki kapasitas untuk menyesuaikan diri sehingga berpenghasilan rendah jauh dari kata sejahtera. Dalam menjawab permasalahan tersebut negara bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan bagi warga negaranya. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan tidak terlepas dari kebutuhan akan jaminan sosial yang sejalan dengan amanat UUD 1945 pada pasal 28 ayat 3 yang berbunyi “setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.

Di Indonesia masih banyak kelompok rentan dan kurang beruntung yang belum tercover oleh perlindungan sosial (jaminan sosial formal). Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan pada tahun 2022 pada sektor formal 57% dan sektor informal 14.00%. mengenai realitas persentase pekerja informal sendiri mencapai 58,14% dari total pekerja di Indonesia. Total penduduk yang bekerja 135.296.713, sedangkan total pekerja yang terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan hanya sebanyak 55.379.720 jiwa sehingga dapat dilihat bahwa pekerja yang terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan tidak lebih dari 41% daripada jumlah total penduduk yang bekerja. Ini menunjukkan bahwa perlindungan pada sektor informal secara umum masih belum tercover jauh dari kata optimal.

Sebagaimana masalah yang telah dijelaskan, masyarakat memiliki sebuah alternatif jaminan sosial dengan menyelenggarakan perlindungan sosial menggunakan skema-skema perlindungan sosial berbasis komunitas yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan wilayahnya. Dengan model perlindungan sosial lokal menggunakan motif dengan sistem kekerabatan, persaudaraan, ikatan persekutuan, dan motif keagamaan. Perlindungan sosial ini juga bersifat informal

dan terbatas hanya untuk anggota internal dalam cakupan wilayah atau kelompok tertentu. ( Suharto, n.d.)

2 Tinjauan Konsep/teori yang relevan dengan kasus/masalah kesejahteraan sosial yang dipilih

a Masalah Sosial

1) Pengertian

Masalah sosial didefinisikan sebagai sesuatu ketidaksesuaian pada unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, sehingga membahayakan kehidupan masyarakat. Dalam keadaan normal terdapat keadaan yang sesuai dan integrasi antar unsur-unsur kebudayaan. (Soerjono, 2002)

Berbeda halnya dengan Parillo (Sriyana, 2021)berpendapat bahwa masalah sosial mengandung empat komponen yakni:

- a) Merupakan kondisi masalah yang dapat bertahan dalam periode waktu tertentu. Bukan kondisi masalah yang dalam waktu singkat kemudian menghilang
- b) Dapat menyebabkan berbagai kerugian fisik atau non fisik, baik pada individu atau masyarakat
- c) Merupakan pelanggaran nilai-nilai atau standar sosial dari sendi kehidupan masyarakat yang ada.
- d) Dapat menimbulkan kebutuhan akan perpecahan

2) Jenis

Masalah sosial diklasifikasikan menjadi masalah sosial klasik dan masalah sosial kontemporer

a) Masalah Sosial Klasik

Yakni masalah sosial yang terjadi pada masa terdahulu atau pada masyarakat yang sederhana. Masalah sosial klasik ini hingga kini masih tetap ada seperti masalah kemiskinan, pengangguran, kejahatan, pelacuran dan lain-lain.

b) Masalah Sosial Kontemporer

Atau disebut juga masalah sosial modern merupakan masalah yang baru terjadi pada masyarakat modern di masa saat ini. Seperti masalah NAPZA, anak jalanan, HIV/AIDS dan lain-lain.

b Kesejahteraan Sosial

Berdasarkan definisi pada Undang-undang No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, Kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial masyarakat agar dapat hidup layak dan mampu



mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

c Perlindungan Sosial

Definisi yang dijelaskan oleh Asian Development Bank perlindungan sosial merupakan strategi kebijakan dan program yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan dan kerentanan yang dialami kelompok lemah dan kurang beruntung dari berbagai risiko ekonomi, sosial dan politik. dengan mempromosikan pasar tenaga kerja yang efisien, meningkatkan kapasitas dan mengurangi kerentanan dari risiko bahaya dan risiko kehilangan pendapatan.(Development Bank, n.d.).

Selain kebijakan yang bersifat formal, perlindungan sosial juga mencakup praktek-praktek informal, seperti yang dapat kita temukan pada masyarakat yang berupa sistem gotong royong, arisan, dukungan keluarga dan teman-teman, hingga skema-skema jaring pengaman sosial dimasyarakat lainnya (Suharto, et al 2006b). Perlindungan sosial terdapat lima jenis, yakni kebijakan pasar tenaga kerja, bantuan sosial, asuransi sosial, skema mikro berbasis komunitas dan perlindungan anak

d Jaminan Sosial

Jaminan sosial merupakan usaha pemerintah dalam melindungi masyarakat (atau sebagian besar masyarakat) terhadap tekanan ekonomi yang berpotensi menyebabkan hilangnya penghasilan disebabkan sakit, pengangguran, cacat, hari tua, dan kematian, serta menyediakan pemeliharaan kesehatan yang dibutuhkan dan memberikan bantuan untuk keluarga dalam memelihara anak. Program jaminan sosial selain agar tercapainya tujuan sosial, juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Selain itu aspek ekonomis dari jaminan sosial adalah peranannya (Sentanoe, 1982).

Jaminan sosial dalam ruang lingkup yang sempit hanya dalam bentuk asuransi sosial serta bantuan sosial. dalam ruang lingkup luas jaminan sosial dimaksudkan guna mencegah dan mengatasi keterbelakangan, ketergantungan, keterlantaran serta kemiskinan pada umumnya. Dalam ruang lingkup murninya jaminan sosial bermakna sebagai perlindungan terhadap risiko sosial-ekonomi yang berdampak risiko kehilangan penghasilan baik disebabkan karena hari tua, cacat sementara atau permanen, kematian, pengangguran dan biaya tambahan untuk perawatan saat mengalami sakit atau mengalami kecelakaan.

e Skema mikro berbasis komunitas

Skema mikro berbasis komunitas atau juga diketahui dengan istilah jaring pengaman sosial berbasis masyarakat merupakan bentuk perlindungan sosial yang diharapkan dapat mengatasi kerentanan masyarakat pada skala komunitas di wilayah tertentu. Perlindungan sosial memberikan jaminan sosial kepada masyarakat yang paling membutuhkan seperti masyarakat pertanian skala kecil dan masyarakat sektor informal di wilayah perkotaan dimana mereka tidak memiliki inisiatif dalam melindungi diri dari risiko apa pun, umumnya dua hal ini menjadi sasaran utama jaminan sosial berbasis masyarakat.

Skema mikro berbasis komunitas membahas kerentanan di tingkat masyarakat meliputi:

- 1). asuransi mikro, melibatkan skema sukarela dan kontribusi masyarakat; asuransi pertanian, suatu bentuk perlindungan yang tersedia bagi komunitas petani untuk menampung risiko bahaya kehilangan, kerugian yang dialami petani.
- 2). dana sosial berbasis masyarakat, yakni mekanisme penyaluran sumber daya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak di tingkat lokal. lalu untuk kesiapsiagaan bencana, dan sebagai manajemen dalam mengatasi atau memitigasi berbagai risiko sosial/ekonomi lainnya.

### 3 Asesmen

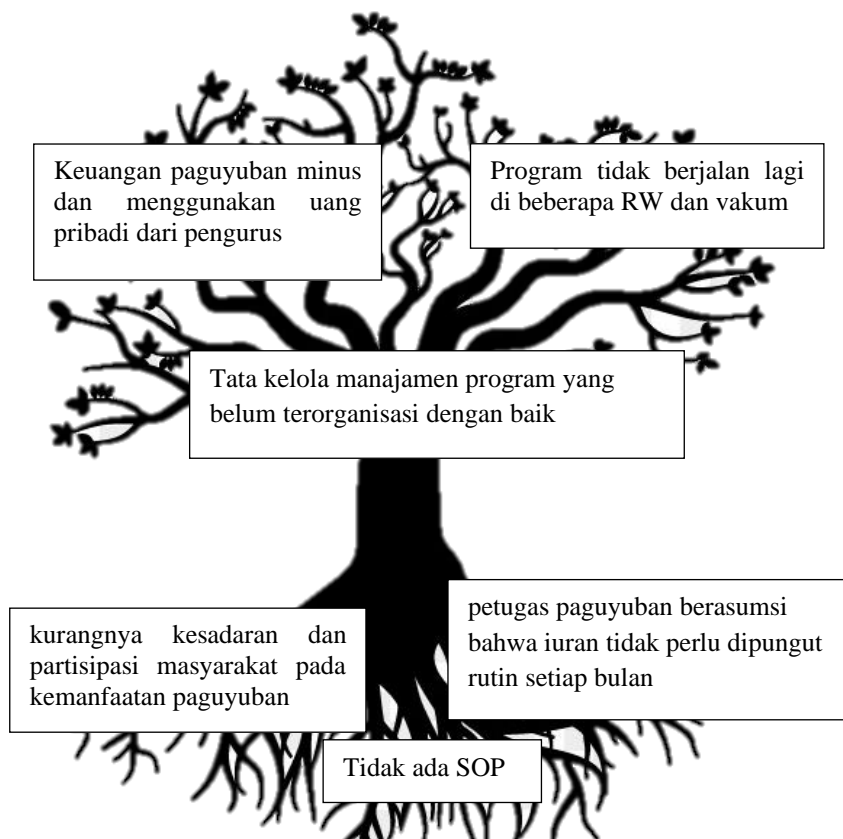
#### a Identifikasi Masalah

##### 1) Penyebab masalah

- a) Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap kemanfaatan paguyuban. Masyarakat tidak menyadari bahwa iuran paguyuban merupakan bentuk jaminan sosial yang bermanfaat bagi diri kita dan keluarga nantinya. Ini berakibat pada kurangnya kesadaran untuk membayar iuran ataupun menunda iuran.
- b) Salah satu pihak yang bertugas untuk menarik iuran tidak memungut iuran dalam jangka waktu beberapa bulan dengan berbagai alasan kendala. Pihak yang bertugas mengumpulkan uang paguyuban berasumsi bahwa iuran tidak perlu dipungut rutin setiap bulan ini dikarenakan warga sendiri ketika ditemui untuk membayar uang paguyuban banyak diantara mereka yang menunda untuk membayar dengan alasan nanti sekalian saja.

- c) Tidak ada standar operasional prosedur (SOP) sehingga kegiatan paguyuban tidak berjalan dengan lancar.
- 2) Dampak Masalah
  - a) Keuangan paguyuban minus sehingga menggunakan uang pribadi dari pengurus.
  - b) Program pada beberapa RW tidak berjalan lagi dalam jangka waktu beberapa tahun ataupun vakum dalam beberapa bulan, alhasil saat terdapat salah satu warga yang memerlukan dana tersebut harus mencari donatur ataupun meminjam uang pribadi pengurus terlebih dahulu, atau bahkan terpaksa tidak diberikan manfaat dana paguyuban.
- 3) Fokus Masalah/masalah inti/masalah utama

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang telah diidentifikasi praktikan, ditemukan berbagai penyebab dan dampak masalah yang berkaitan dengan program paguyuban di Kelurahan Cimincrang. Maka praktikan menentukan fokus masalah pada ‘tata kelola manajemen program yang belum terorganisasi dengan baik’. Berikut pohon masalah untuk identifikasi masalah dijelaskan pada gambar 2.1



Gambar 2.1 Pohon masalah analisis jaminan sosial

b Identifikasi Kebutuhan

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan yang telah dilakukan dan penentuan fokus masalah, maka dapat dirumuskan kebutuhan apa saja yang sesuai dengan permasalahan yang ada yaitu:

- 1) Menerapkan sistem manajemen pengelolaan yang baru dan terstruktur. Dimana dengan sistem manajemen pengelolaan yang baru akan lebih terorganisir dari kepengurusan, administrasi, pengelolaan dana, hingga aspek pengendalian dan pengawasan.
- 2) Meningkatkan pemahaman terkait kemanfaatan program paguyuban

c Identifikasi Potensi dan Sumber

1) Potensi

Adapun potensi yang terdapat di Kelurahan Cimincrang yang dapat dimanfaatkan dalam rencana Intervensi adalah:

- a) Dalam keseharian masyarakat saling bantu membantu dalam suka maupun duka.
- b) Pemerintah setempat yang kondusif dan mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c) Keinginan masyarakat agar program kembali berjalan.

2) Sistem Sumber

Berikut analisis sistem sumber Berdasarkan teori sistem sumber dari Allan Pincus dan Anne Minahan (Specht, 1974), sistem sumber kesejahteraan tiga jenis, yaitu:

a) Sistem Sumber Formal

Sistem sumber formal adalah keanggotaan internal organisasi atau asosiasi resmi yang dapat menyediakan bantuan atau layanan langsung kepada anggotanya.

Sistem sumber formal yang ada di kelurahan Cimincrang adalah program paguyuban karena dalam hal ini masyarakat yang dapat mengakses dan mendapatkan manfaat hanyalah yang terdaftar sebagai warga Cimincrang.

b) Sistem Sumber Informal

System sumber informal adalah sumber yang dapat memberikan bantuan, baik dalam bentuk bantuan dukungan emosional dan afeksi maupun nasehat dan informasi. Penggunaan sistem sumber informal tidak menggunakan prosedur, bersifat tanpa pamrih, penuh persahabatan dan tidak ada latar belakang yang tidak baik.

System sumber informal pada Kelurahan Cimincrang adalah tokoh masyarakat, ketua RW dan RT.

c) Sistem Sumber Kemasyarakatan

Sistem sumber kemasyarakatan adalah sumber yang berupa lembaga-lembaga pemerintah ataupun swasta untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan dapat diakses oleh seluruh jenis dan lapisan masyarakat.

Sistem sumber kemasyarakatan yang ada yakni BMT Imtaq, PKK, dan Pemerintah Kelurahan.

4 Rencana Intervensi

a Latar Belakang

Praktikan melaksanakan asesmen masalah dengan menggunakan teknik Non Partisipatif yakni melakukan wawancara Bersama Bapak Andri Nugraha selaku Sekretaris Kelurahan Cimincrang yang sebelumnya menjabat sebagai Seksi Kesos, ketua RW 02 dan ketua RW 01. wawancara dengan bapak Andri membahas seputar berbagai masalah yang berkaitan dengan jaminan sosial yang berada di Kelurahan Cimincrang. Kemudian hasil wawancara yang telah didapatkan sebelumnya ditentukan satu isu yakni mengenai program paguyuban, kemudian secara terfokus dilakukan wawancara bersama ketua RW 01 bapak dan Ibu Cucu selaku ketua RW 02 sekaligus menjabat sebagai bendahara paguyuban di RW 02. mengenai masalah yang berkaitan dengan paguyuban yang menjadi bentuk jaminan sosial berbasis komunitas di Wilayah RW 01 dan 02 Kelurahan Cimincrang.

Berdasarkan hasil asesmen jaminan sosial berbasis komunitas di Kelurahan Cimincrang program ini bernama “paguyuban” yang pelaksanaannya ada dikelola pemerintah RW. Jaminan ini utamanya sebagai jaminan kematian yang akan diberikan berupa kain kafan yang diserahkan kepada keluarga yang berduka. Di RW 01 sendiri berbeda karena untuk kain kafan telah ada donatur tetap yang memberikan kain kafan bagi warga yang meninggal sehingga pada RW 01 paguyuban diberikan dalam bentuk uang untuk keperluan kepengurusan jenazah lainnya.

Setiap RW memiliki kebijakan yang berbeda dalam penyelenggaraannya. Baik dalam struktur kepengurusan, besar premi, hingga sistem pembayaran. Dalam pelaksanaannya program paguyuban ini memiliki masalah yang cukup menghambat hingga RW 02 program ini berhenti tidak berjalan dalam kurun waktu beberapa bulan, bahkan di RW 03 tidak melaksanakan lagi.

Permasalahan yang ditemui pada program “paguyuban” yang pertama yakni kurangnya kesadaran masyarakat dan partisipasi

masyarakat terkait kemanfaatan program paguyuban, sehingga acapkali masyarakat suka menunda membayar iuran dan bahkan kadang ditemukan yang belum membayar dalam kurun waktu yang cukup lama. dari hal ini berdampak pada pendapat dana yang masuk tidak seimbang dengan dana yang keluar.

Berikut disajikan data pada tabel 2.1 mengenai pemasukan dana paguyuban dalam periode 2022 dengan pembayaran sebesar 2.500 untuk setiap KK setiap bulan

Tabel 2.1 Pemasukan dana paguyuban periode 2022

RW 01				
No.	RT	Jumlah KK	Dana Masuk	Dana seharusnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1	30	846.000	900.000
2	2	32	932.500	960.000
3	3	40	1.127.500	1.200.000
Jumlah			2.906.000	3.060.000
RW 02				
i.	1	38	250.000	1.140.000
ii.	2	50	102.500	1.500.000
iii.	3	44	222.500	1.320.000
Jumlah			575.000	3.960.000

Kedua, mengakar dari ketidaksadaran tersebut mengakibatkan pihak pengelola yang bertugas menarik dana iuran tidak rutin menagih setiap bulan dengan asumsi jika warga sadar maka warga yang akan mendatangi petugas.

Berdasarkan permasalahan yang ada dalam program paguyuban tersebut, maka praktikan mengusulkan program yang berupa pengonsepan ulang manajemen dan pengelolaan program paguyuban yang diharapkan dapat menjadi solusi untuk pemecahan masalah.

b Tujuan umum dan khusus

1) Tujuan Umum

Program ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan pengelolaan program paguyuban

2) Tujuan Khusus

a) Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat mengenai pentingnya dan kemanfaatan program paguyuban

- b) Meningkatkan program dari segi pengelolaan, keefektifan, hingga kemanfaatan program
- c Bentuk Kegiatan dan Program
  - 1). Nama Program
 

Nama program yang diajukan oleh praktikan dalam upaya menangani permasalahan di atas yaitu “Bina Paguyuban”
  - 2). Bentuk Kegiatan
 

Bentuk kegiatan yang nantinya ada dalam program ‘Bina Paguyuban’ yaitu:

    - a) Pembinaan terkait penyusunan tata kelola atau manajemen pengelolaan program paguyuban kepada pihak pengelola program paguyuban.
    - b) sosialisasi mengenai kemanfaatan program paguyuban kepada masyarakat.
- d Sistem Partisipan
 

Sistem partisipan dalam pelaksanaan program bina paguyuban ini sebagai berikut:

  - 1) *Initiator System*, adalah pihak yang pertama kali melihat masalah. Dimana dalam program ini adalah pihak praktikan.
  - 2) *Change Agent System*, ialah pihak yang nantinya diberi tanggung jawab dalam mengatur perubahan yang akan dilakukan. Dalam program ini adalah pekerja sosial
  - 3) *Client Sistem*, merupakan pihak yang menjadi calon penerima pelayanan, baik secara langsung ataupun tidak. Dalam program ini ialah masyarakat Kelurahan Cimincrang, pengelola Paguyuban.
  - 4) *Support System*, adalah pihak yang memiliki perhatian akan keberhasiandari perubahan program yakni perangkat kelurahan, masyarakat, dan pekerja sosial
  - 5) *Controlling System*, pihak atau lembaga yang memiliki otoritas formal dan kekuasaan dalam menerima atau menolak perubahan. Dala hal ini yakni Lurah Kelurahan Cimincrang
  - 6) *Implementing System*, pihak yang memiliki tugas rutin melaksanakan dan mengelola pelaksanaan perubahan Dalam program ini yaitu pekerja sosial, pemerintah tingkat RW, Pengelola paguyuban, Tim Pelaksana, Narasumber
  - 7) *Target System* adalah individu , keluarga, struktur, kebijakan, dan praktik yang perlu di rubah agar para klien sistem memperoleh manfaat yang diharapkan. dalam hal in target sistemnya ialah masyarakat kelurahan Cimincrang, pengelola Program, dan Pemerintah setempat

- 8) *Action System*, Merupakan individu dari berbagai sistem yang berperan aktif dalam perancangan serta implementasi perubahan. Dalam hal ini ialah Pengelola Paguyuban, Tim pelaksana dan Pekerja sosial.

e Metode dan Teknik

1) Metode

Metode yang akan diterapkan oleh praktikan dalam program ini adalah *Community Organization/ Community Development* atau juga dikenal sebagai pengembangan masyarakat lokal. Dimana metode ini memandang bahwa perubahan atau pengembangan masyarakat dapat dilakukan dengan baik melalui partisipasi aktif masyarakat lokal. selain itu dalam intervensi ini juga menggunakan metode Bimbingan Komunitas

2) Teknik

Teknik yang digunakan adalah kolaborasi, dan penyuluhan sosial. Dimana kolaborasi ini merupakan teknik relasi kerja sama antara sistem-sistem perubahan yang saling menyetujui bahwa perubahan perlu dilakukan. Dalam hal ini kolaborasi antara pekerja sosial (praktikan), Pemerintah RW, Pengelola program paguyuban. Sedangkan penyuluhan sosial dalam teknik perubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebaran informasi, komunikasi, motivasi dan edukasi oleh penyuluh sosial.

f Rencana Anggaran Biaya dan alat yang dibutuhkan

Rincian anggaran biaya dan alat yang digunakan pada program bina paguyuban diuraikan pada tabel 2.2 dan tabel 2.3

Tabel 2.2 Rencana anggaran biaya program bina paguyuban pada kegiatan penyusunan manajemen tata kelola program

Penyusunan Manajemen Tata Kelola Program					
No.	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Paket LCD Proyektor	1	unit	250.000	tersedia
2.	Audio Speaker	1	unit	150.000	tersedia
3.	Honorarium Narasumber	2	orang/jam	900.000	1.800.000



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Honorarium panitia	5	orang/jam	50.000	250.000
5.	Snack Narasumber	1	orang	20.000	20.000
6.	Snack peserta dan panitia	20	orang	10.000	200.000
Total					2.270.000

Tabel 2.3 Rencana anggaran biaya program bina paguyuban pada kegiatan sosialisasi

Sosialisasi					
No.	Uraian	Volume	Satuan	Harga satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Honorarium Narasumber	1	orang/jam	900.000	900.000
2.	Sound System	1	unit	150.000	tersedia
3.	Snack Narasumber	1	orang	20.000	20.000
4.	snack Peserta dan Panitia	40	orang	10.000	400.000
5.	Honorarium Panitia	5	orang	50.000	250.000
Jumlah					1.570.000

Berdasarkan tabel 2.1 Pembuatan rancangan anggaran program bina paguyuban mengacu pada pedoman yang diatur oleh Kementerian Keuangan pada Peraturan Menteri Keuangan RI No.83 /PMK.02/2022 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2023

Adapun alat penunjang yang diperlukan dalam pelaksanaan program Bina Paguyuban dijelaskan pada tabel 2.4

Tabel 2.4 Alat penunjang program bina paguyuban

No.	Alat	Jumlah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ATK	1 set	tersedia
2.	Sound System	1 unit	tersedia
3.	LCD Proektor	1 unit	tersedia
4.	Layar Proyektor	1 unit	tersedia
5.	Laptop	1 unit	tersedia

g Analisis Kelayakan Program

Adapun analisis kelayakan program ini menggunakan analisis SWOT, Menurut Fredi Rangkuti (2004: 18), Analisis SWOT merupakan identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Berikut analisis program diuraikan dalam matriks 2.1

Matriks 2.1 Analisis SWOT program bina paguyuban

<b>Faktor Internal</b>	<b>Strength</b> 1. adanya keinginan dari masyarakat untuk memperbaiki sistem pengelolaan program paguyuban 2. kesesuaian antara pelaksanaan program dan kebutuhan dari permasalahan 3. adanya narasumber yang sesuai dengan kebutuhan program	<b>Weakness</b> adanya kemungkinan peserta tidak memahami apa yang disampaikan oleh pemateri
<b>Faktor Eksternal</b>		
<b>Opportunities</b> Banyak pihak yang mendukung program ini	<b>Strategi SO</b> 1. memastikan tim benar-benar memahami materi 2. mengoptimalkan partisipasi dan dukungan aktif dari semua pihak terlibat	<b>Strategi WO</b> 1. penggunaan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. 2. teknik penyuluhan dengan komunikasi dua arah
<b>Threats</b> kemungkinan beberapa peserta tidak menghadiri pelaksanaan program	<b>Strategi ST</b> meminta ketersediaan peserta meluangkan waktu mengikuti pelaksanaan jauh hari sebelum pelaksanaan.	<b>Strategi WT</b> memberikan undangan kepada peserta secara langsung

h Jadwal dan Langkah-langkah

Berikut merupakan langkah-langkah dan jadwal kegiatan program bina paguyuban

- 1) Pra Pelaksanaan
  - a) Identifikasi peserta kegiatan Peserta kegiatan adalah pengurus paguyuban dan perwakilan masyarakat di RW 02.
  - b) Pembentukan tim pelaksana
  - c) Penetapan narasumber  
Melihat dari permasalahan tentang Jaminan Sosial berbasis komunitas yang ada di kelurahan Cimincrang. Maka narasumber yang dipilih merupakan dosen dari Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.
  - d) Penyiapan Materi  
Adapun materi disiapkan oleh narasumber
  - e) Penyiapan lokasi dan pelaksanaan program  
Lokasi yang digunakan dalam kegiatan ini adalah kantor kelurahan dan basecamp karang taruna.
- 2) Pelaksanaan
  - a) Penyusunan Manajemen Tata Kelola Program

Tabel 2.5 Jadwal kegiatan penyusunan manajemen tata kelola program

No	Waktu (WIB)	Kegiatan	Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	08.30-09.00	Persiapan	Panitia
2.	09.00-09.10	Pembukaan	MC
3.	09.10-09.15	Pembacaan Doa	Acara
4.	09.15-09.20	Menyanyikan lagu Indonesia raya	MC
5.	09.20-09.30	Sambutan	Ketua pelaksana
6.	09.30-10.15	Pemaparan materi	Narasumber
7.	10.15-11.00	Diskusi	MC dan narasumber
8.	11.00-11.40	Penulisan hasil diskusi terkait penyusunan tata kelola manajemen program	Seluruh partisipan dan panitia
9.	11.40-11.45	dokumentasi	Panitia
10.	11.45-11.50	Penutupan	MC

b) Sosialisasi

Tabel 2.6 Jadwal kegiatan sosialisasi kemanfaatan program paguyuban

No.	Waktu (WIB)	Kegiatan	Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	08.30-09.00	persiapan	Panitia
2.	09.00-09.10	Pembukaan	MC
3.	09.10-09.15	Pembacaan Doa	Acara
4.	09.15-09.20	Menyanyikan lagu Indonesia raya	MC
5.	09.20-09.30	Sambutan	Ketua pelaksana
6.	09.30-10.15	Pemaparan materi	Narasumber
7.	10.15-10.30	diskusi	MC dan narasumber
8.	10.30-10.40	Penutupan	MC

3) Pasca Pelaksanaan

a) Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan dan dipimpin oleh Lurah Cimincrang dibantu oleh Pekerja Sosial (Praktikan). Kemudian lain dari pada hal itu praktikan melakukan monitoring dari pra pelaksanaan hingga pasca pelaksanaan dengan hasil disampaikan pada hasil evaluasi.

b) Penyusunan Laporan

Penyusunan laporan dilaksanakan oleh Pekerja Sosial (Praktikan). Laporan disusun berdasarkan kaidah atau pedoman penyusunan laporan dan diberikan kepada pemerintah Kelurahan Cimincrang dan pemerintah RW.

## B Profil Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial

### 1 Gambaran Umum Masalah

Kondisi lansia memiliki tingkat kerentanan sosial ekonomi yang tinggi, dimana lansia membutuhkan perlindungan sosial yang dapat melindungi kehidupan lansia. Namun hal ini bila dilihat dari data BPS tahun 2021 menunjukkan, sekitar satu dari empat (24,20 persen) rumah tangga lansia pernah menerima program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sebanyak 11,86 persen rumah tangga lansia tercatat sebagai penerima program keluarga harapan (PKH) dan

15,01 persen yang memiliki Kartu Perlindungan Sosial atau Kartu Kesejahteraan Sosial (KPS/KKS). Sekitar tujuh dari sepuluh (70,96 persen) lansia memiliki jaminan kesehatan nasional (JKN) dan sekitar satu dari sepuluh (11,62 persen) lansia yang memiliki jaminan sosial. Cakupan perlindungan sosial bagi lansia masih jauh dari harapan, terutama untuk lansia pada kelompok pengeluaran 40 persen terbawah.

Berbagai program pemerintah yang ada masih jauh dalam mengover perlindungan bagi lansia. Untuk melindungi lansia dari kerentanan sosial ekonomi tidak hanya ditekankan pada bentuk perlindungan dari pemerintah juga sudah selayaknya lansia terlindungi oleh keluarga dan lingkungan sekitar. Warga masyarakat berpartisipasi dalam mendukung dan memberikan perlindungan bagi lansia rentan dalam bentuk bantuan sosial hasil swadaya dari masyarakat.

Namun dalam pelaksanaannya bantuan swadaya masyarakat ini belum terlaksana dengan baik yang diakibatkan dari beberapa faktor, baik dikarenakan masalah ketersediaan dana yang belum dapat sepenuhnya membantu, hingga dalam proses pemberian bantuan yang terkadang masih disalahgunakan oleh anggota keluarga penerima manfaat.

## 2 Tinjauan Konsep/teori yang relevan dengan kasus/masalah kesejahteraan sosial yang dipilih.

### b Bantuan Sosial

#### 1) Definisi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 bantuan sosial didefinisikan sebagai bantuan berupa uang, barang ataupun jasa kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat dimana mereka dinyatakan kurang mampu, tidak mampu, ataupun rentan terhadap risiko sosial.

Bantuan sosial diberikan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan melindungi dari risiko sosial. Dimana bantuan sosial ini bersifat tidak terus menerus dan selektif.

#### 2) Bentuk

Berdasarkan undang-undang nomor. 11 tahun 2009 bentuk bantuan sosial dijelaskan dapat berbentuk makanan pokok, pakaian, tempat tinggal atau rumah penampungan sementara, dana tunai, layanan perawatan kesehatan dan obat-obatan, akses pelayanan dasar baik kesehatan hingga Pendidikan, bimbingan teknis/supervisi, dan penyediaan pemakaman.

#### 3) Sumber Dana bantuan Sosial

Dana bantuan sosial dapat bersumber dari negara, hibah, dan sumber dana dari masyarakat.

a) Sumber Dari negara

Bantuan sosial yang bersumber dari negara ini dianggarkan dari dua sumber, yang pertama pajak melalui dana APBN/APBD dimana pengelolaannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Kedua bersumber dari dana Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS), dimana pemerintah menurut ketentuan peraturan undang-undangan dapat menjalankan pengumpulan uang atau barang serta pengelolaan pajak kegiatan undian yang hasilnya dituangkan dalam bentuk Dana Usaha Kesejahteraan Sosial.

b) Sumber Dana Hibah

pemerintah pusat atau pemerintah daerah Negara berhak menerima atau menolak bantuan berupa dana hibah dari luar negeri dimana dengan skema dana hibah dari pemerintah negara lain ke pemerintah (Government to Government), swasta/organisasi/masyarakat luar negeri kepada pemerintah (Private to Government), dan skema dari swasta/organisasi/masyarakat luar negeri kepada masyarakat dalam negeri (private to privat).

Dalam pelaksanaan bantuan sosial yang bersumber dari dana hibah ini harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Baik dari segi mekanisme pelaksanaan maupun dalam hal pelaporan penggunaan dana bantuan harus didasarkan pada ketentuan perundangan.

c) Sumber Masyarakat

Prinsip kesetiakawanan sosial mendasari bantuan sosial yang bersumber dari masyarakat ini. Dimana dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab bersama bagi pemerintah dan masyarakat. Dalam bentuk dana hibah masyarakat, sumbangan/pengumpulan uang dan barang diberikan kepada perorangan atau kelompok dengan tujuan untuk membantu dalam penanganan masalah sosial.

c Dasar Hukum Sumber Dana Bantuan Sosial

- 1) Permensos Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial

- 2) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 3) Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan II Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD
- 4) Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga

d Fundraising atau Pengumpulan Uang dan Barang

Fundraising merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris yakni kata *fund* yang berarti dana dan kata *raising* yang berarti menghimpun atau mengumpulkan. Sehingga fundraising bermakna sebagai suatu kegiatan dalam rangka penggalangan dana dan daya baik dari individu, organisasi, perusahaan, yayasan, pemerintah maupun badan hukum yang digunakan untuk membiayai program atau kegiatan kemanusiaan.

Fundraising atau dikenal juga di Indonesia sebagai Pengumpulan Uang dan Barang didefinisikan sebagai setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian, dan kebudayaan.

e Lanjut Usia

1) Pengertian Lanjut Usia

Menurut Undang-undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Terdapat dua kelompok lanjut usia yaitu lanjut usia potensial yang merupakan lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan atau jasa serta lanjut usia tidak potensial yang merupakan lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.

2) Pelayanan Lanjut Usia Tidak Potensial

Pelayanan lansia tidak potensial dibedakan menjadi lanjut usia di panti dan non panti. Lanjut usia di panti merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat melalui donasi, meliputi jaminan kebutuhan dasar dan jaminan kesehatan. Sedangkan bagi lanjut usia tidak potensial yang tinggal di rumah menjadi tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah. Fasilitas yang dilakukan untuk peningkatan kesejahteraan bagi lansia yang di rumah adalah fasilitas sosial

bagi lanjut usia tidak potensial miskin, bantuan kesehatan melalui BPJS dan pendampingan yang dilakukan oleh keluarga dan masyarakat.

- 3) Kebijakan-Kebijakan Terkait Lanjut Usia
  - a) Undang-undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
  - b) Undang-undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
  - c) Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
  - d) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2004 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia
  - e) Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

### 3 Asesmen

#### a Identifikasi Masalah

##### 1) Penyebab Masalah

- a) Keterbatasan dana swadaya masyarakat yang tidak sepadan dengan intensitas kebutuhan penerima layanan untuk berobat.
- b) Ketidaktahuan warga dan pengurus mengenai ambulans swadaya masyarakat Cimincrang yang boleh digunakan secara gratis tanpa beban pembayaran bagi warga yang benar-benar membutuhkan tanpa adanya Batasan penggunaan selama dan justru akan diutamakan
- c) Ketidaktahuan warga dan pengurus terkait adanya dana santunan dari perusahaan BIENSI yang rutin dibagikan setiap bulan bagi yatim piatu dan duafa.

##### 2) Dampak Masalah

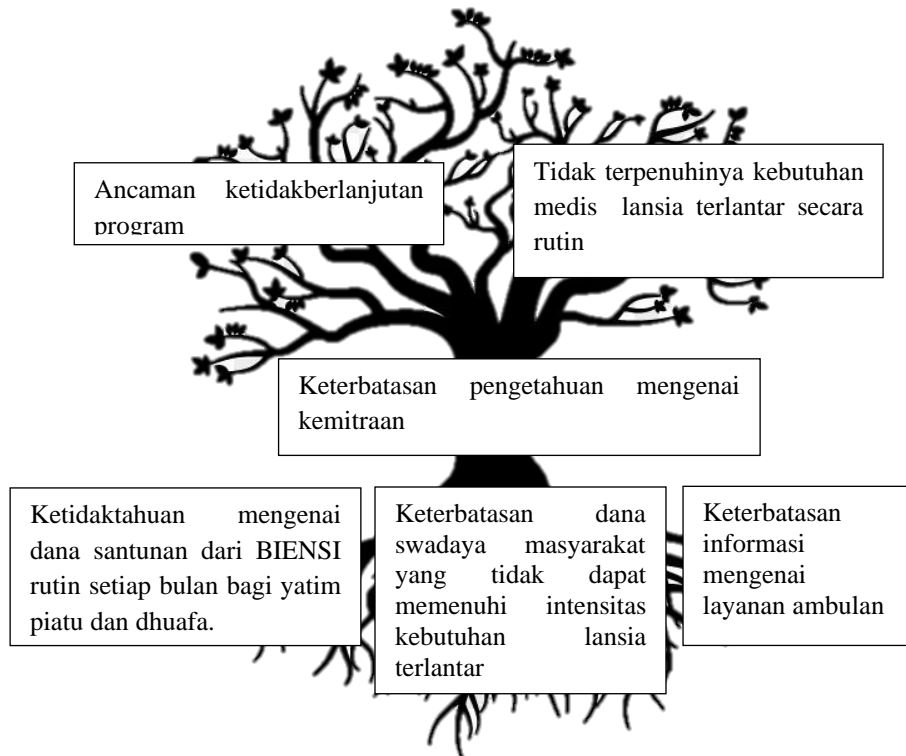
- a) Ancaman terjadinya ketidakberlanjutan program. Karena dana sering kali tidak dapat memenuhi kebutuhan dari pada lansia terlantar.
- b) tidak terpenuhinya kebutuhan medis bagi lansia terlantar secara rutin yang juga mengakibatkan pada kesembuhan lansia yang tak kunjung membaik

##### 3) Fokus Masalah

Dari analisis hasil asesmen mengenai swadaya masyarakat untuk lansia terlantar maka dirumuskan fokus permasalahan utama yakni keterbatasan pengetahuan mengenai kemitraan dalam program swadaya.



Adapun analisis masalah dengan menggunakan teknologi pohon masalah dijelaskan melalui pohon masalah pada gambar 2.2



Gambar 2.2 Pohon masalah analisis sumber dana bantuan sosial

**b Identifikasi Kebutuhan**

Terkait dengan analisis masalah yang telah dijelaskan diatas maka kebutuhan yang diperlukan yaitu:

- 1) Pengetahuan masyarakat terkait kemitraan yang dapat membantu pertolongan kepada lansia terlantar
- 2) Memberikan pemahaman kepada anggota keluarga dari lansia terlantar mengenai peran dan dukungannya terkait kebutuhan lansia.

**c Identifikasi Potensi dan Sumber**

**1) Potensi**

Adapun potensi yang dapat digunakan dalam penanganan masalah diatas yaitu:

- a) Kepedulian masyarakat yang begitu besar pada kondisi kesejahteraan anggota kelompoknya
- b) Keinginan masyarakat yang tinggi dalam menemukan solusi yang tepat agar pertolongan kepada lansia terlantar lebih efektif

- c) Adanya pihak-pihak dan layanan lain yang dapat menjadi mitra atau penunjang layanan tambahan.

2) Sumber

a) Sistem Sumber Formal

Sistem sumber formal adalah keanggotaan internal organisasi atau asosiasi resmi yang dapat menyediakan bantuan atau layanan langsung kepada anggotanya. Sistem sumber formal juga dapat membantu anggota untuk memanfaatkan sistem sumber kemasyarakatan. Sistem sumber formal yang ada pada Kelurahan Cimincrang adalah keanggotaannya sebagai warga Kelurahan Cimincrang dan dari RW 02. dan terdaftar sebagai penduduk Kota Bandung

b) Sistem Sumber Informal

Sistem sumber informal adalah sumber yang dapat memberikan bantuan, baik dalam bentuk bantuan dukungan emosional dan afeksi maupun nasehat dan informasi. Penggunaan sistem sumber informal tidak menggunakan prosedur, bersifat tanpa pamrih, penuh persahabatan dan tidak ada latar belakang yang tidak baik.

Sistem sumber informal yang ada yaitu keluarga, teman, tetangga, *interest group* dan pihak lain yang bersedia membantu.

c) Sistem Sumber Kemasyarakatan

Merupakan sumber yang dapat diakses oleh seluruh jenis dan lapisan masyarakat tanpa diharuskan adanya status keanggotaan. Dimana sistem sumber kemasyarakatan di Kelurahan Cimincrang adalah kantor Kelurahan Cimincrang, Puskesmas, Klinik, dan pusat kesehatan lainnya.

4 Rencana Intervensi

a Latar Belakang

Praktikan melaksanakan asesmen masalah dengan melakukan wawancara bersama Bapak Andri Nugraha selaku sekretaris Kelurahan Cimincrang yang sebelumnya menjabat sebagai Seksi Kesos, ketua RW 02. wawancara dengan bapak Andri membahas seputar berbagai masalah yang berkaitan dengan berbagai program bantuan sosial dan masalah yang ditemukan dalam pelaksanaan bantuan sosial yang berada di Kelurahan Cimincrang. Kemudian hasil wawancara yang telah didapatkan sebelumnya ditentukan satu isu mengenai swadaya masyarakat

untuk lansia terlantar yang terdapat di wilayah RW 02. Kemudian secara terfokus dilakukan wawancara bersama ketua RW 02 yakni Ibu Cucu dan Ibu Dwi sebagai salah satu pengurus dana swadaya masyarakat untuk lansia terlantar.

Masyarakat RW 02 berswadaya dalam membantu pemenuhan kebutuhan anggota masyarakatnya sebagai Lansia terlantar. Dengan memberikan bantuan berupa makanan setiap harinya secara bergiliran, serta bantuan berupa uang swadaya yang digunakan untuk keperluan pengobatan yakni biaya mobilitas lansia terlantar yang menderita sakit autoimun. Berdasarkan penuturan Ibu Popon selaku kader yang sering mendampingi pengobatan lansia terlantar menuturkan mobilitas pengobatan lansia terlantar ini cukup intens namun, kami mengalami keterbatasan dana swadaya sehingga menyebabkan tidak seterusnya kebutuhan lansia terutama untuk kebutuhan pengobatan tersebut dapat terpenuhi.

Dalam pelaksanaannya juga terjadi hambatan ketika dana yang terkumpul tidak dapat memenuhi kebutuhan lansia. Dilain sisi, ternyata warga tidak mengetahui mengenai layanan ambulans yang dapat digunakan secara Cuma-cuma bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Warga berpikir layanan ambulans yang sudah tersedia tetap harus membayar bensin dan memberikan jasa kepada sopirnya, namun setelah praktikan menemui Bapak Hari Julian yang menjadi pengurus ambulans masyarakat menuturkan jika kasus demikian justru merupakan prioritas dan akan sepenuhnya ditanggung pihak pengelola.

Praktikan juga menemui ketua forum RW Bapak Iyang yang menuturkan bahwa perusahaan BIENSI yang berada di Kelurahan Cimincrang setiap bulanya memberikan dana santunan untuk kaum duafa dan anak yatim yang diberikan kepada mereka yang didaftarkan. Namun, warga RW 02 juga tidak mengetahui adanya program tersebut, padahal hal ini dapat dijadikan mitra dengan mendaftarkan lansia terlantar tersebut.

Untuk memberikan bantuan yang dapat optimal maka dibutuhkan inovasi penyaluran bantuan dan diperlukan kerja sama atau kemitraan dengan pihak yang dapat memberikan bantuan pertolongan bagi lansia terlantar. Selain itu, dilihat dari kondisi Kelurahan Cimincrang terdapat banyak peluang sumber yang dapat dijadikan mitra dalam proses pertolongan.

- b Tujuan Umum dan Khusus
  - 1) Tujuan Umum

Tujuan dari disusunnya program ini adalah untuk mengoptimalkan bantuan swadaya masyarakat bagi kebutuhan lansia terlantar.

2) Tujuan Khusus

- a) Edukasi kepada pihak pengelola mengenai pengetahuan menjalin kemitraan.
- b) Pengelola swadaya dan masyarakat mengetahui pihak-pihak yang dapat dijadikan mitra dan dapat menyusun langkah-langkah untuk menjalin kerja sama

c Bentuk Kegiatan dan Nama Program

1) Nama Program

Berdasarkan latar belakang dan analisis masalah serta kebutuhan dengan ini praktikan mengusulkan suatu program dengan nama “Pengembangan Strategi Kemitraan untuk Swadaya Lansia Terlindungi”.

2) Bentuk Kegiatan

Mengenai bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program intervensi, yaitu:

a) *Sharing Session* dan edukasi

*Sharing session* merupakan kegiatan diskusi informal saling bertukar informasi, pengetahuan dan pengalaman. Topik bahasan dalam Kegiatan ini akan mengenai strategi menjalin kemitraan dimana dalam kegiatan ini akan melibatkan pihak stakeholder dari lembaga zakat atau yayasan yang bergerak dalam bidang fundraising.

b) Melakukan Pemetaan Kemitraan

Dalam kegiatan ini akan dilakukan diskusi bersama mengenai badan/lembaga/organisasi apa saja yang dapat dijadikan mitra dalam swadaya masyarakat ini. Setelah ter-petakan kemudian dilakukan penghubungan dengan mitra.

d Sistem Partisipan

- 1) *Initiator System*, adalah pihak yang pertama kali melihat masalah. Dimana dalam program ini adalah pihak pekerja sosial.
- 2) *Change Agent System*, ialah pihak yang nantinya diberi tanggung jawab dalam mengatur perubahan yang akan dilakukan. Dalam program ini adalah pekerja sosial.
- 3) *Client Sistem*, merupakan pihak yang menjadi calon penerima pelayanan, baik secara langsung ataupun tidak. Dalam program ini ialah masyarakat, penerima manfaat, pihak pengelola swadaya.

- 4) *Support System*, adalah pihak yang memiliki perhatian akan keberhasilan dari perubahan program yakni pemerintah kelurahan, pihak pengurus RW
- 5) *Controlling System*, pihak atau lembaga yang memiliki otoritas formal dan kekuasaan dalam menerima atau menolak perubahan. Dalam hal ini yakni Lurah Kelurahan Cimincrang
- 6) *Implementing System*, pihak yang memiliki tugas rutin melaksanakan dan mengelola pelaksanaan perubahan Dalam program ini yaitu pekerja sosial, pengelola swadaya, narasumber dari BMT Itqan.
- 7) *Target System* adalah individu , keluarga, struktur, kebijakan, dan praktik yang perlu di rubah agar para klien sistem memperoleh manfaat yang diharapkan. dalam hal in target sistemnya ialah masyarakat RW 02.
- 8) *Action System*, Merupakan individu dari berbagai sistem yang berperan aktif dalam perancangan serta implementasi perubahan. Dalam hal ini ialah Pekerja sosial dan pengelola program swadaya RW 02.

e Metode dan Teknik

1) Metode

Dalam program ini menggunakan metode *Community Development/ Community Organization* dengan model aksi sosial. Definisi *Community development* menurut edi Suharto ialah bagian dari metode pekerjaan sosial dengan tujuan utamanya untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat dengan mendayagunakan sumber yang dimiliki masyarakat serta menekankan partisipasi sosial.

2) Teknik

Teknik yang digunakan dalam kegiatan ini adalah diskusi atau pertukaran pemikiran untuk mendapatkan informasi, komunikasi, motivasi dan edukasi yang akan diberikan kepada penerima manfaat dan keluarga. Selain itu juga akan menggunakan metode kolaborasi yakni relasi kerja sama antar sistem-sistem perubahan yang saling menyetujui perubahan harus dilakukan.

f Rencana Anggaran Biaya dan alat yang dibutuhkan

Anggaran Biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Program Pengembangan Strategi Kemitraan untuk Swadaya Lansia Terlindungi' dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.7 Rencana biaya program pengembangan strategi kemitraan untuk swadaya lansia terlindungi

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Honorarium Narasumber	1	Orang/jam	900.000	900.000
2	Konsumsi Narasumber	1	Orang/kegiatan	45.000	45.000
3	Konsumsi peserta	20	Orang/kegiatan	10.000	200.000
Jumlah					1.145.000

Pembuatan rancangan anggaran Program pengembangan strategi kemitraan untuk swadaya lansia terlindungi yang dilampirkan pada tabel diatas mengacu pada pedoman yang diatur oleh Kementerian Keuangan pada Peraturan Menteri Keuangan RI No.83 /PMK.02/2022 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2023.

Adapun alat pendukung yang digunakan dalam kegiatan Sharring Session dan Pemetaan Kemitraan dijelaskan pada tabel 2.8

Tabel 2.8 Alat pendukung program pengembangan strategi kemitraan untuk swadaya lansia terlindungi

No.	Alat	Jumlah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ATK	1 set	tersedia
2	Sound System	1 unit	tersedia
3	Infocuss	1 unit	tersedia
4	laptop	1 unit	tersedia

g Analisis Kelayakan Program

Analisis kelayakan program ini menggunakan analisis SWOT. Dimana analisis ini merupakan identifikasi berbagai faktor secara sistematis agar terumuskan strategi. Berikut analisis SWOT program intervensi yang akan dilakukan dijelaskan pada matriks 2.2

Matriks 2.2 Analisis SWOT program pengembangan strategi kemitraan untuk swadaya lansia terlindungi

<p><b>Faktor Internal</b></p>	<p><b>Strength</b></p> <p>1). Adanya pihak pendukung dari forum RW Cimincrang</p> <p>2). Keinginan warga yang besar untuk menolong dan memperbaiki sistem</p>	<p><b>Weakness</b></p> <p>kemungkinan masyarakat tidak mengetahui cara menjalin dan mempertahankan kemitraan</p>
<p><b>Faktor Eksternal</b></p> <p><b>Opportunities</b></p> <p>1). Terdapat badan usaha yang ada di kelurahan Cimincrang dapat menjadi sumber atau</p> <p>2). Terdapat program-program pendukung dari lembaga lain</p>	<p><b>Strategi SO</b></p> <p>1). Mengembangkan program dengan menghubungkan kepada pihak mitra</p> <p>2). Menjalinkan kolaborasi antara warga, forum RW dan kemitraan lainnya.</p>	<p><b>Strategi WO</b></p> <p>memberikan edukasi kepada warga mengenai cara menjalani dan mempertahankan kemitraan</p>
<p><b>Threats</b></p> <p>Adanya kemungkinan penolakan pengajuan oleh badan usaha/calon mitra</p>	<p><b>Strategi ST</b></p> <p>Proposal dibuat dengan tujuan yang jelas dan meyakinkan pihak mitra</p>	<p><b>Strategi WT</b></p> <p>Menyusun Rencana strategis dengan mengutamakan komunikasi yang baik untuk meyakinkan kemitraan</p>

h Jadwal dan Langkah-langkah

Adapun Langkah-langkah dan jadwal kegiatan dalam program intervensi adalah sebagai berikut:

1) Pra Pelaksanaan

a) *Sharing Session*

Diawali dengan penentuan narasumber yang akan menjadi pemateri dan berbagi pengalaman mengenai bantuan tun sosial swadaya masyarakat dalam hal ini di ajukan pihak adari BMT Itqan yang menjadi salah satu lembaga yang memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan di lokasi RW 02, alokasi dana dan kemitraan. Dilanjutkan dengan penentuan lokasi pelaksanaan kegiatan *sharing session*.

b) Pemetaan Kemitraan

Penentuan calon lembaga yang dapat menjadi mitra dan membantu dalam Menyusun mengenai kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam menjalin kemitraan.

2) Pelaksanaan

a) *Sharing Session*

Tabel 2.9 Jadwal kegiatan sharring session program pengembangan strategi kemitraan untuk swadaya lansia terlindungi

No.	Waktu	Kegiatan	Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)
1	08.30-09.00	Persiapan setting lokasi	Praktikan dengan peserta
2	09.00-09.05	Pembukaan	Praktikan
3	09.05-09.10	Sambutan	Praktikan
4	09.10-09.40	Pemaparan Materi	Narasumber
5	09.40-10.10	Sharing Session	Praktikan, narasumber
6	10.10-10.20	Penutupan	Praktikan

b) Pemetaan Kemitraan

Dalam kegiatan ini praktikan membantu dengan berperan sebagai fasilitator yakni dalam penyusunan pemetaan calon mitra dengan pertimbangan faktor kelebihan, kekurangan, serta pendukung dan hambatan yang berpengaruh bagi masing-masing calon mitra dan mengarahkan mengenai segala kebutuhan yang disiapkan untuk menghubungi calon mitra untuk pengajuan kemitraan.

3) Pasca Pelaksanaan

Kegiatan terakhir yakni evaluasi, dimana dalam hal ini pelaksanaan oleh praktikan. selama proses kegiatan berlangsung hingga pasca pelaksanaan, pekerja sosial berperan dalam memonitoring jalanya program dan disimpulkan pada pelaksanaan evaluasi.



## C Profil Analisis Pemberdayaan Sosial

### 1 Gambaran Umum Masalah

Masalah kemiskinan di Indonesia menjadi permasalahan yang tak kunjung terselesaikan. Kemiskinan berimplikasi pada kerentanan perempuan, karena permasalahan Kemiskinan erat kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi perempuan. kaitan ini disebabkan oleh keterbatasan perempuan dalam kesempatan bekerja di sektor publik, terbatasnya kapasitas pendidikan, kesehatan serta keterbatasan keamanan perempuan. Selain itu hal ini dipengaruhi oleh permasalahan gender serta adanya ketidakadilan dan ketidaksetaraan kondisi relasi kekuasaan.

Tahun 2022 badan pusat statistik mencatat persentase penduduk perempuan di bawah garis kemiskinan sebesar 9,68%. Sementara itu di Kota Bandung terdapat 79.573 keluarga miskin, dimana 22,5% dari keluarga miskin tersebut atau sebanyak 17.890 adalah keluarga miskin berkepala keluarga perempuan.

Berdasarkan UUD 1945 negara wajib menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negaranya yang berada pada garis kemiskinan atau tidak mampu atau yang mengalami kerentanan. Sebagai wujud pelaksanaan kewajiban negara tersebut, pemerintah memberikan perlindungan sosial, jaminan sosial, bantuan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan sosial. Adapun pemberdayaan merupakan prasyarat mutlak dalam upaya penanggulangan kemiskinan. pemberdayaan sosial berdasarkan undang-undang nomor 14 tahun 2019 adalah upaya yang ditujukan agar menjadikan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah sosial dapat berdaya sehingga memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Dalam pemberdayaan yang ditujukan untuk perempuan mengacu pada pendapat ife (1995) berarti pengintegrasian masyarakat terhadap akses sumber daya dan kesempatan, meningkatkan kapasitas dengan memberikan pengetahuan dan keahlian, serta akses untuk berpartisipasi dalam kehidupan komunitas. disisi lain perempuan juga memiliki potensi, maka dari itu diperlukan upaya pengentasan kemiskinan yang sistematis dan terencana hal ini dapat diberikan melalui program pemberdayaan disertai akses terhadap fasilitas, bantuan modal atau sebagainya guna meningkatkan kesejahteraan perempuan.

Di Kota Bandung banyak program pemberdayaan yang dimiliki pemerintah seperti Program Inovasi Pemberdayaan Kewilayahan atau disebut PIPPK. PIPPK merupakan program dengan tujuan

meningkatkan indeks pembangunan manusia yang berbasis pada partisipasi masyarakat dan swadaya masyarakat. Selain itu secara di Kota Bandung terdapat program pemberdayaan sekoper cinta (sekolah pemberdayaan perempuan capai impian dan cita-cita) yang lebih spesifik sebagai program pemberdayaan perempuan.

2 Tinjauan konsep/teori yang relevan dengan kasus/masalah kesejahteraan sosial yang dipilih

a Pemberdayaan Sosial

1) Pengertian

Pemberdayaan atau *empowerment* berasal dari kata *power* yang berarti kuasa atau berdaya. Dalam hal ini pemberdayaan dapat didefinisikan sebagai sebuah proses, cara, perbuatan yang ditujukan untuk menjadikan berdaya atau berkuasa. Menurut profesor Edi Suharto ide utama pemberdayaan adalah kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita lakukan, terlepas dari keinginan dan minat mereka.

definisi pemberdayaan menurut Jim ife merupakan pemberian sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan agar masyarakat meningkatkan kemampuan dalam menentukan masa depan mereka sendiri dan dapat berpartisipasi pada upaya mempengaruhi kehidupan kelompoknya.

Pemberdayaan sosial menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 adalah segala usaha yang diupayakan agar menjadikan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah sosial dapat berdaya sehingga memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

2) Dasar Hukum

- a) Bagian Keempat, Pasal 12 Tentang Pemberdayaan Sosial Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- c) Undang-undang No. 14 Tahun 2019 tentang Pekerjaan Sosial

3) Prinsip pemberdayaan

a) Kesetaraan

Berasal dari kata setara yang memiliki arti sebagai memiliki kesamaan tingkatan, kedudukan sama tidak lebih tinggi ataupun lebih rendah. Tidak ada dominasi

kedudukan atau sub ordinasi kedudukan diantara pihak-pihak yang terlibat. Baik antara masyarakat dengan lembaga penyelenggara program pemberdayaan maupun dengan pihak lain yang terlibat semua dilaksanakan atas dasar kesamaan derajat dan kedudukan.

b) Partisipatif

Esensi pemberdayaan masyarakat adalah partisipasi. Kendati demikian, partisipasi masyarakat dapat dinyatakan sebagai pemberdayaan apabila memuat kewenangan atau sebagian kewenangan dan memberikan dorongan untuk berdaya.

c) Keswadayaan

Dalam pemberdayaan masyarakat salah satu prinsip pentingnya adalah keswadayaan. Hal ini didasari karena sumber utama dalam pengembangan kapasitas serta kemandirian bergantung pada masyarakat itu sendiri. Upaya menumbuhkembangkan kapasitas dan kemandirian inilah yang disebut keswadayaan.

d) Berkelanjutan

Pemberdayaan merupakan proses yang dilakukan secara terus menerus, berkelanjutan serta berkesinambungan. Pemberdayaan Bukan proses yang instan, sekedar melaksanakan program pembangunan yang dibatasi waktu dan anggaran, dan bukan sesuatu yang impulsif.

b Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

1) Pengertian

Perempuan Rawan Sosial Ekonomi adalah wanita pada kisaran usia 18-59 tahun yang tinggal dalam rumah tangga miskin baik yang menikah atau belum menikah atau janda yang tidak memiliki penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari atau istri yang ditinggal suami tanpa batas waktu. Perempuan Rawan sosial Ekonomi adalah sosok perempuan yang masih memiliki rasa kurang percaya diri, apatis, rendah diri, serta aspirasi material yang tinggi.

Kehidupan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi tergolong ke dalam kelompok miskin. Dimana sebagian PRSE berpenghasilan di bawah 14.175

2) Dasar hukum

a) Permensos nomor 08 Tahun 2012

- b) Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

### 3 Asesmen

#### a Identifikasi Masalah

##### 1) Penyebab masalah

- a) Kompleksitas kebutuhan dan Kebutuhan mendesak, dimana penghasilan yang dihasilkan tidak sepadan dengan pengeluaran. Namun kebutuhan harus tetap dipenuhi
- b) Tidak ada pihak peminjam lain atau enggan meminjam pada bank formal dikarenakan alasan persyaratan yang sulit dan rumit. Ketika adanya kebutuhan yang mendesak, maka kebutuhan akan pinjaman harus segera didapatkan, untuk meminjam kepada tetangga, teman atau sebagainya belum tentu ada. Jika harus menggunakan jasa dari bank konvensional ada kesulitan proses yang dianggap lebih rumit sehingga lebih memilih menggunakan jasa bank keliling yang jauh lebih mudah dan dapat langsung menerima uang pinjaman, bahkan pihak bank keliling yang datang langsung pada pemerlu layanan pinjaman.
- c) Petugas dari bank keliling selalu datang dan mendekati warga. Tawaran dan marketing yang menggiurkan dirasa lebih menarik dan mudah menjadikan banyak ibu rumah tangga tertarik untuk melakukan pinjaman.

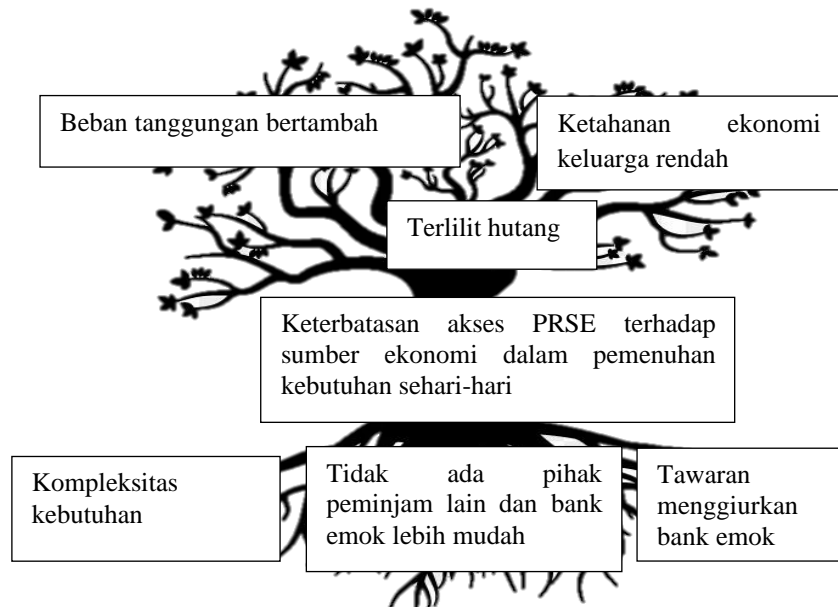
##### 2) Dampak Masalah

- a) Terlilit hutang karena saat tidak dapat membayar, hutang pinjaman naik dan menyebabkan terjadi pengulangan dalam siklus pinjaman. Hal ini karena dengan bunga yang ada dan belum dapat dibayarkan, bunga tersebut wajib dibayar dengan meminjam lagi dan dibayar pada pinjaman selanjutnya. Hal inilah yang menyebabkan angka pinjaman naik dan terus meminjam.
- b) Beban tanggungan bertambah
- c) Ketahanan ekonomi keluarga menjadi rentan. Pada dasarnya pinjaman uang pada bank keliling justru tidak menjadi solusi untuk pemenuhan kebutuhan, bank keliling menjadi beban dan menyebabkan nasabah merasa kebingungan ketika harus membayar angsuran namun nasabah sendiri pendapatannya belum bisa membayar sehingga gerak aktivitas menjadi terhambat.

##### 3) Fokus Masalah/masalah inti/masalah utama

Dari hasil identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka fokus masalah adalah keterbatasan akses yang dimiliki PRSE terhadap sumber ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan hidup.

Adapun identifikasi masalah dijabarkan dengan analisis pohon masalah digambarkan pada gambar 2.3



Gambar 2.3 Pohon masalah analisis pemberdayaan sosial

b Identifikasi Kebutuhan

Berdasarkan hasil asesmen masalah diatas maka kebutuhan yang diperlukan adalah

- 4) membentuk kemandirian perempuan rawan sosial ekonomi dengan menciptakan produktivitas perempuan dalam bidang yang dapat mendatangkan peluang usaha
- 5) terciptanya wadah yang dapat menjadi solusi untuk tidak lagi terlibat dengan bank keliling dan dapat memberikan ruang partisipatif yang memberdayakan Perempuan.
- 6) dukungan kesadaran dan kepedulian Bersama baik dari warga masyarakat dan tokoh pemerintah setempat untuk menghilangkan kebiasaan pinjaman kepada bank keliling.

c Identifikasi Potensi dan Sumber

1) Potensi

- a) perempuan rawan sosial ekonomi yang menjadi nasabah bank keliling berada pada masa usia produktif

- b) Tingginya keinginan perempuan rawan sosial ekonomi yang menjadi nasabah bank keliling agar tidak lagi meminjam dan dapat memiliki pendapat sendiri
- c) Terdapat ruang usaha yang dapat dijadikan wadah usaha bersama
- d) Adanya dukungan dari masyarakat.

## 2) Sumber

### a) Sistem Sumber Formal

Sistem sumber formal adalah keanggotaan internal organisasi atau asosiasi resmi yang dapat menyediakan bantuan atau layanan langsung kepada anggotanya. Sistem sumber formal juga dapat membantu anggota untuk memanfaatkan sistem sumber kemasyarakatan.

Sistem sumber formal yang ada pada Kelurahan Cimincrang adalah pemerintah Kota Bandung hingga pemerintah kelurahan.

### b) Sistem Sumber Informal

Sistem sumber informal adalah sumber yang dapat memberikan bantuan, baik dalam bentuk bantuan dukungan emosional dan afeksi maupun nasehat dan informasi. Penggunaan sistem sumber informal tidak menggunakan prosedur, bersifat tanpa pamrih, penuh persahabatan dan tidak ada latar belakang yang tidak baik.

Sistem sumber informal yang ada masyarakat Kelurahan Cimincrang, tetangga, kerabat dan keluarga.

### c) Sistem Sumber Kemasyarakatan

Merupakan sumber yang dapat diakses oleh seluruh jenis dan lapisan masyarakat tanpa diharuskan adanya status keanggotaan. Dimana sistem sumber kemasyarakatan yang dapat diakses oleh perempuan rawan sosial ekonomi di Kelurahan Cimincrang adalah kantor kelurahan Cimincrang, PKK, karang taruna, dinas pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak.

## 4 Rencana Intervensi

### a Latar Belakang Masalah

Praktikan menggunakan teknik Non Partisipatif pada asesmen awal yakni wawancara Bersama Bapak Andri Nugraha selaku sekretaris Kelurahan Cimincrang yang sebelumnya menjabat sebagai Seksi Kesos. wawancara dengan bapak Andri membahas seputar berbagai program pemberdayaan yang berada di Kelurahan Cimincrang. Kemudian hasil wawancara yang telah

didapatkan sebelumnya ditentukan satu isu permasalahan mengenai Isu Perempuan Rawan Sosial Ekonomi dan secara terfokus dilakukan wawancara dengan salah satu PRSE dan abah Odang selaku tokoh masyarakat.

Pemenuhan kebutuhan hidup pada kalangan kelas menengah kebawah cenderung mengalami kesulitan, terutama bagi perempuan rawan sosial ekonomi baik mereka yang menikah dan memiliki suami, maupun menikah dan berperan sebagai *single parents*. Perempuan rawan sosial ekonomi ini tidak memiliki pendapatan atau pendapatan yang dihasilkan tidak berbanding lurus dengan beban kebutuhan yang ditanggung. Menurut penuturan salah satu PRSE, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sudah diupayakan beberapa cara, namun hadirnya fenomena bank keliling yang dianggap lebih mudah dan efektif untuk menjadi solusi dana bagi pemenuhan kebutuhan hidupnya. Karena pandangan ini akhirnya nasabah/prse justru mendapatkan masalah terjerat pinjaman dan peminjaman yang dilakukan akhirnya berulang sehingga intensitas peminjaman semakin sering dan tinggi.

Dalam kesempatan ini, praktikan didukung kelompok ibu pengajian dan juga termasuk PRSE yang terlibat pinjaman bank emok melakukan MPA yang menghasilkan informasi mengenai sebab akibat masalah, potensi dan sumber, solusi pemecahan masalah terkait jeratan pinjaman bank emok.

b Tujuan umum dan khusus

1) Tujuan Umum

Menciptakan kemandirian perempuan rawan sosial ekonomi dengan pembentukan koperasi dan peningkatan produktivitas.

2) Tujuan Khusus

a) Meningkatkan produktivitas dengan potensi yang tersedia

b) Terbentuknya wadah yang dapat menjadi tempat bagi nasabah PRSE meningkatkan produktivitas dan kemandiriannya

c) Terwujudnya masyarakat yang sejahtera

c Bentuk Kegiatan dan Program

1) Nama Program

Nama Program yang diajukan praktikan untuk intervensi ini adalah “Perempuan Mandiri Bersama Melalui Pembentukan Koperasi Untuk Meningkatkan Produktivitas Perempuan”.

- 2) Bentuk Kegiatan  
Bentuk kegiatan yang dirancang untuk program ini, yaitu:
  - a) Pembentukan Koperasi
  - b) Pelatihan dan workshop mengenai pemilihan target pasar, penentuan produk usaha dan sistem marketing.

d Sistem Partisipan

Sistem partisipan yang ada dalam program Perempuan Mandiri Bersama Melalui Pembentukan Koperasi Untuk Meningkatkan Produktivitas Perempuan yaitu:

- 1) *Initiator System*, adalah pihak yang pertama kali melihat masalah. Dimana dalam program ini adalah pihak praktikan.
- 2) *Change Agent System*, ialah pihak yang nantinya diberi tanggung jawab dalam mengatur perubahan yang akan dilakukan. Dalam program ini adalah pekerja sosial
- 3) *Client Sistem*, merupakan pihak yang menjadi calon penerima pelayanan, baik secara langsung ataupun tidak. Dalam program ini ialah PRSE di Kelurahan Cimincrang.
- 4) *Support System*, adalah pihak yang memiliki perhatian akan keberhasilan dari perubahan program yakni pemerintah kelurahan, masyarakat, Dinas PPPA, Dinas Koperasi dan UMKM, dan pekerja sosial
- 5) *Controlling System*, pihak atau lembaga yang memiliki otoritas formal dan kekuasaan dalam menerima atau menolak perubahan. Dalam hal ini yakni Lurah Kelurahan Cimincrang
- 6) *Implementing System*, pihak yang memiliki tugas rutin melaksanakan dan mengelola pelaksanaan perubahan Dalam program ini yaitu pekerja sosial, Kepala Bidang Bina Usaha dan Pemasaran Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung, tim pelaksana
- 7) *Target System* adalah individu , keluarga, struktur, kebijakan, dan praktik yang perlu di rubah agar para klien sistem memperoleh manfaat yang diharapkan. dalam hal ini target sistemnya ialah masyarakat.
- 8) *Action System*, Merupakan individu dari berbagai sistem yang berperan aktif dalam perancangan serta implementasi perubahan. Dalam hal ini ialah Pekerja sosial dan Kepala Bidang Bina Usaha dan Pemasaran Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung.

e Metode dan Teknik

1) Metode

Adapun metode yang digunakan dalam program ini adalah metode *Community Organization Community Development*



(COCD) dimana dalam metode ini memandang bahwa perlunya keterlibatan kolektif anggota komunitas. *Community Development* atau diketahui juga dengan istilah pengembangan masyarakat lokal dalam hal ini untuk dapat melaksanakan program. Dan *Community Organization* untuk mengatur pihak-pihak yang dapat terlibat dalam pelaksanaan program.

2) Teknik

Adapun teknik yang digunakan yakni teknik kolaborasi dengan *capacity building* untuk meningkatkan kemampuan serta pendampingan dan pemberdayaan perempuan rawan sosial ekonomi.

f Rencana Anggaran Biaya dan alat yang dibutuhkan

Adapun rencana anggaran biaya dan alat yang dibutuhkan selama pelaksanaan program dijelaskan pada tabel 2.10

Tabel 2.10 Rencana anggaran biaya program perempuan mandiri bersama melalui pembentukan koperasi untuk meningkatkan produktivitas perempuan

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ATK	1	Paket	1.000.000	1.000.000
2.	Honorarium Narasumber	1	Orang/jam	1.000.000	1.000.000
3.	Notaris	1	Orang/kegiatan	1.500.000	1.500.000
4.	Konsumsi Narasumber	1	Orang/kegiatan	45.000	45.000
5.	Konsumsi peserta	20	Orang/kegiatan	25.000	500.000
6.	Konsumsi Notaris	1	Orang/kegiatan	25.000	25.000
7.	Snack Narasumber	1	Orang/kegiatan	20.000	20.000
8.	Snack peserta	20	Orang/kegiatan	10.000	200.000
Jumlah					4.290.000

Pembuatan rancangan anggaran diatas mengacu pada pedoman yang diatur oleh Kementerian Keuangan pada Peraturan Menteri

Keuangan RI No.83 /PMK.02/2022 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2023.

Adapun alat pendukung yang digunakan dalam proses intervensi ini dijelaskan pada tabel 2.11

Tabel 2.11 Alat pendukung program perempuan mandiri bersama melalui pembentukan koperasi untuk meningkatkan produktivitas perempuan

No.	Alat	Jumlah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ATK	1 set	tersedia
2	LCD Proyektor	1 unit	tersedia
3	laptop	1 unit	tersedia
4	Sounds System	1 paket	tersedia

g Analisis Kelayakan Program

Analisis kelayakan dalam program ini menggunakan analisis SWOT yang dijabarkan pada matriks 2.3

Matriks 2.3 Analisis SWOT program perempuan mandiri bersama melalui pembentukan koperasi untuk meningkatkan produktivitas perempuan

<b>Faktor Internal</b>	<b>Strength</b> 1). Adanya keinginan yang tinggi dari nasabah (prse) untuk bisa mandiri 2). dukungan warga yang besar untuk menolong	<b>Weakness</b> adanya perspektif untuk memperoleh kelancaran dan pendapat usaha dengan waktu yang singkat
<b>Faktor Eksternal</b>		
<b>Opportunities</b> 1). Terdapat kesesuaian program dengan kebutuhan kelompok sasaran 2). Terdapat narasumber yang sesuai dengan program	<b>Strategi SO</b> 1). rancangan program disesuaikan dengan potensi yang ada dan dengan penyesuaian pelatihannya 2). Menjalinkan kolaborasi	<b>Strategi WO</b> memberikan pemahaman terkait ukuran keberhasilan berdasarkan proses dan kesesuaian hasil, bukan berdasarkan waktu.
<b>Threats</b> Adanya kemungkinan kurangnya pemahaman secara detail melaksanakan program	<b>Strategi ST</b> Perlu adanya rencana berkelanjutan untuk wadah konsultasi rutin	<b>Strategi WT</b> 1). Menyusun rencana strategis dengan komunikasi baik 2). Materi mudah dimengerti sasaran

h Jadwal dan langkah kegiatan

1) Pembentukan koperasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Dan Pembinaan Perkoperasian Bab II mengenai Tata Cara Pendirian Koperasi adalah sebagai berikut :

- a) Rapat Pendirian Koperasi.
- b) Rapat ini dihadiri oleh para pendiri koperasi yang dalam hal ini adalah PRSE yang terjerat hutang bank emok, pengurus PKK dan Pekerja Sosial (Praktikan) dan minimal 20 dan dapat dihadiri oleh notaris yang nantinya akan mencatat kesepakatan tentang pokok-pokok hasil pembahasan dalam rapat pendirian untuk dirumuskan dalam akta pendirian. Dalam rapat pendirian koperasi ini dipimpin oleh pimpinan rapat dan sekretaris yang ditunjuk oleh para pendiri untuk membahas pokok-pokok materi rancangan anggaran dasar yang meliputi:
  - (1) nama koperasi;
  - (2) nama para pendiri;
  - (3) alamat tetap atau tempat kedudukan koperasi; d.
  - (4) jenis koperasi;
  - (5) jangka waktu berdiri;
  - (6) maksud dan tujuan;
  - (7) keanggotaan koperasi;
  - (8) perangkat organisasi koperasi;
  - (9) modal koperasi;
  - (10) besarnya jumlah setoran simpanan pokok dan Simpanan Wajib;
  - (11) bidang dan kegiatan usaha koperasi;
  - (12) pengelolaan;
  - (13) pembagian sisa hasil usaha;
  - (14) perubahan anggaran dasar;
  - (15) ketentuan mengenai pembubaran dan penyelesaiannya, serta hapusnya status badan hukum;
  - (16) sanksi;
  - (17) peraturan khusus.
- c) Setelah menetapkan nama koperasi sebagai hasil rapat persiapan pendirian dapat di lakukan konfirmasi oleh

Notaris pada Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi (SISMINBHKOP). Koperasi yang telah memperoleh persetujuan nama kemudian wajib mengajukan permohonan Akta Pendirian dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.

- d) Untuk mendapatkan pengesahan terhadap akta pendirian Koperasi, para pendiri atau kuasa para pendiri mengajukan permintaan pengesahan secara tertulis kepada Menteri dengan menggunakan SISMINBHKOP dengan melampirkan beberapa dokumen seperti dua rangkap akta pendirian Koperasi, berita acara rapat pendirian Koperasi, bukti penyetoran modal paling sedikit sebesar simpanan pokok, dan rencana awal kegiatan usaha Koperasi.
  - e) Permohonan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi dilakukan secara tertulis dengan cara mengisi Format Isian Akta Pendirian Koperasi sebagaimana tersedia pada SISMINBHKOP.
  - f) Kemudian Menteri akan menerbitkan Keputusan pengesahan Akta Pendirian koperasi jika permohonan pendirian disetujui dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengisian format isian akta pendirian dan dokumen yang diunggah dinyatakan telah dipenuhi secara lengkap dan benar oleh Pejabat yang berwenang. Dan keputusan tersebut disampaikan secara elektronik.
  - g) Kemudian Notaris dapat langsung melakukan pencetakan Surat Keputusan Menteri tentang pengesahan Akta Pendirian Koperasi.
  - h) Keputusan pengesahan Akta Pendirian Koperasi dihimpun oleh Kementerian Koperasi dan UKM dan dicatat dalam Buku Daftar Umum Koperasi dan dapat dibuat secara elektronik yang kemudian menyampaikan salinan keputusan pengesahan Akta Pendirian Koperasi kepada Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai tempat kedudukan koperasi.
- 2) Pelatihan dan workshop dalam penentuan target pasar, jenis produk dan teknik pemasaran.

Pada kegiatan ini narasumber berasal dari yakni Kepala Bidang Bina Usaha dan Pemasaran Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung.

Tabel 2.12 Jadwal pelatihan dan workshop dalam penentuan target pasar, jenis produk dan teknik pemasaran

No.	Waktu (WIB)	Kegiatan	Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	08.30-09.00	Pembukaan	Pekerja Sosial
2.	09.00-11.45	Penentuan pasar dan jenis produk	Narasumber
3.	11.45-12.45	Ishoma	
4.	12.45-14.45	Teknik Pemasaran	Narasumber
5.	14.45-15.00	Penutupan	Pekerja Sosial

## D Profil Analisis Penataan Lingkungan Sosial

### 1 Gambaran Umum Masalah

Manusia dalam memenuhi kebutuhannya baik kebutuhan dasar hingga kebutuhan sosial tidak dapat dipisahkan dari lingkungan, ini memberikan definisi bahwa hubungan manusia dan lingkungan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Lingkungan tidak hanya bermakna sebagai lingkungan fisik atau alam, tapi juga bermakna sebagai lingkungan non-fisik atau juga disebut dengan istilah lingkungan sosial.

Kondisi lingkungan yang buruk akan berpengaruh pada kualitas hidup serta kondisi sosial di masyarakat, begitupun sebaliknya, berbagai kondisi kegiatan manusia akan berpengaruh pada lingkungannya. Kondisi Lingkungan yang ideal dipengaruhi hubungan sosial manusia yang menduduki lingkup wilayah tersebut yang sering kali diwarnai oleh oleh kepentingan-kepentingan antar manusia yang berbeda dan terus berkembang.

Dalam lingkungan sosial terdapat berbagai macam nilai, norma, budaya dan proses interaksi sosial. melalui interaksi sosial individu, keluarga ataupun kelompok dalam lingkungan sosial akan saling bekerja sama, menghargai, rukun dan gotong royong yang menciptakan bentuk keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Dimana dalam interaksi sosial ini terdapat kontak sosial yang dalam kehidupan lingkungan sosial sering terjadi kontak

sosial yang menggiring masyarakat pada kondisi kerenggangan dan perpecahan. Isu ini biasanya dipicu dari kegagalan komunikasi dan tak ayal sering dijumpai sebab terjadinya kerenggangan dalam masyarakat karena adanya benturan kepentingan.

2 Tinjauan konsep/teori yang relevan dengan kasus/masalah kesejahteraan sosial yang dipilih

a Penataan Lingkungan Sosial

Definisi Lingkungan Sosial menurut Saragih, dkk (2013:2) diartikan sebagai semua orang atau manusia yang mempengaruhi individu baik secara langsung ataupun tidak langsung. Lingkungan sosial didalamnya terdapat berbagai macam norma, interaksi masyarakat baik secara individu atau kelompok. Lingkungan sosial menurut Sartain diartikan sebagai manusia atau seluruh orang yang mempengaruhi kita. Menurut Elizabeth Barnett dan Michele Casper di dalam lingkungan sosial mencakup lingkungan fisik langsung, hubungan sosial, lingkungan budaya di dalam kelompok manusia yang ditentukan berfungsi dan berinteraksi.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penataan diartikan sebagai cara, proses, perbuatan menata pengaturan, penyusunan. Penataan lingkungan menurut Checkoway tidak hanya berupa pengembangan fisik saja, tetapi juga pengembangan layanan sosial pada tingkat lingkungan. Penataan lingkungan sosial dari definisi di atas dapat diartikan sebagai proses atau pengaturan kekuatan yang ada di masyarakat dan berbagai sistem norma di sekitar masyarakat itu sendiri dimana sistem norma tersebut mempengaruhi tingkah laku dan interaksi antar warga. penataan lingkungan juga diartikan sebagai proses masyarakat meningkatkan program atau layanan sosial pada tingkat lingkungan ketetangaan.

Dalam penataan lingkungan diperlukan keterlibatan masyarakat karena masyarakatlah yang berperan dari norma, kebiasaan, nilai yang terdapat diwilayah bersangkutan. Meninjau dari konsep antropologi di dalam lingkungan sosial terdapat kekuatan masyarakat, sistem dan norma yang saling mempengaruhi interaksi dan tingkah laku masyarakat. Sehingga dalam penataan lingkungan sosial kekuatan juga disusun agar dapat menciptakan lingkungan sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

b Interaksi Sosial

5 Pengertian Interaksi Sosial

Menurut H. Boner dalam bukunya *Social Psychology* Interaksi sosial adalah suatu hubungan antara dua individu atau lebih, dimana kelakuan individu yang mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu lain, atau sebaliknya. Sedangkan menurut Basrowi (20015) menjelaskan bahwa interaksi sosial merupakan hubungan dinamis yang mempertemukan orang dengan orang, kelompok dengan kelompok, maupun orang dengan kelompok manusia. Menurutnya bentuk interaksi sosial tidak sebatas kerja sama, tetapi juga tindakan, persaingan, pertikaian dan sejenisnya.

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa interaksi sosial adalah kemampuan dalam hubungan kelompok individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun individu dengan kelompok manusia yang saling mempengaruhi dan memiliki hubungan timbal balik.

#### 6 Aspek-aspek Interaksi Sosial

Soekanto (2002) merumuskan dua aspek interaksi sosial yakni:

- a) Aspek kontak sosial, yakni peristiwa terjadinya hubungan sosial antara individu satu dengan lain. Kontak tidak hanya fisik tapi berlangsung pula kontak secara simbolik seperti senyum, jabat tangan. Kontak sosial dapat positif atau negatif. Kontak sosial negatif mengarah pada suatu pertentangan dan kontak sosial positif mengarah pada kerja sama.
- b) Aspek komunikasi, Komunikasi merupakan proses pertukaran informasi, ide, konsepsi, pengetahuan dan perbuatan. Tujuan utama komunikasi adalah menciptakan pengertian bersama dengan maksud untuk mempengaruhi pikiran atau tingkah laku seseorang menuju ke arah positif.

#### 7 Bentuk-bentuk Interaksi Sosial

Pendapat yang disampaikan Sarwono dan Meinarno (2009) bentuk-bentuk interaksi sosial sebagai berikut :

- a) Kerja sama, adalah suatu perbuatan yang dikerjakan bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan dan dengan unsur saling membantu satu sama lain.
- b) Persaingan, yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk meniru atau melebihi apa yang dilakukan atau dimiliki oleh orang lain.

- c) Konflik, merupakan suatu ketegangan yang terjadi antara dua orang atau lebih karena ada perbedaan cara pemecahan suatu masalah.
- d) Akomodasi, suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk mengurangi ketegangan, perbedaan, dan meredakan pertentangan dengan melakukan kompromi sehingga terjadi suatu kesepakatan dengan pihak lain yang bersangkutan

### 3 Asesmen

#### a Identifikasi Masalah

##### 1) Penyebab Masalah

- a) Dalam komunikasi dengan pihak UIN Sunan Gunung Djati yang sedang melaksanakan proyek pembangunan, Pihak Pengurus RW dalam hal ini Ketua RW bersikap bertindak sepihak tanpa pengetahuan dan persetujuan warga.
- b) Aspirasi yang pernah diajukan oleh masyarakat tidak dihiraukan oleh pihak Pengurus RW dalam hal ini Ketua RW yang berhubungan dengan pihak pembangunan UIN Sunan Gunung Jati.
- c) Tidak ada wadah komunikasi rutin bagi warga dengan pihak pengurus RW yang seharusnya menjadi tempat saling berbagi informasi dan dapat merekatkan hubungan sosial serta interaksi sosial yang baik antara warga dan pengurus RW.

##### 2) Dampak Masalah

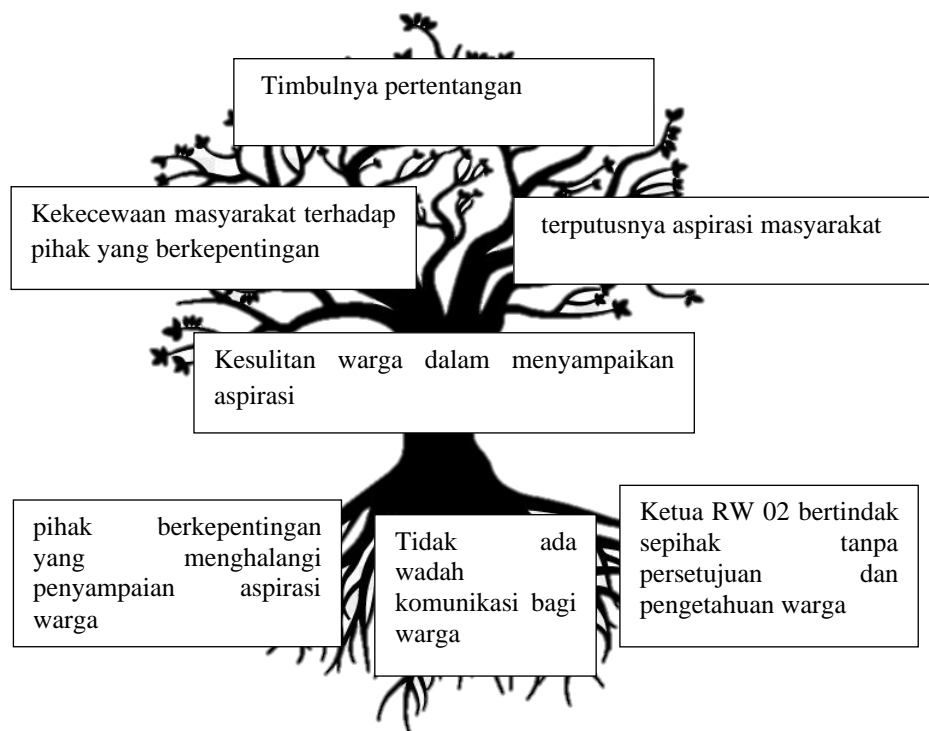
- e) Terputusnya aspirasi warga. Aspirasi yang ingin warga sampaikan kepada pihak UIN Sunan Gunung Djati melalui Pengurus RW yang dalam hal ini Ketua RW tidak pernah dihiraukan seolah-olah tidak ada warga tidak berhak mengetahui dan menyampaikan aspirasinya terkait masalah dampak proyek atau AMDAL pada proyek pembangunan UIN Sunan Gunung Djati.
- f) Adanya kekecewaan warga kepada pihak aparat desa yang berkepentingan dalam hal ini adalah kepada ketua RW. Kekecewaan ini berujung pada lunturnya kepercayaan warga terhadap Ketua RW.
- g) Timbulnya pertentangan dari warga terhadap ketua RW. ini memicu pada hubungan sosial yang renggang dalam kehidupan warga. Selain itu juga mengakibatkan adanya ketidakpatuhan dan



keengganan warga dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang diamanatkan melalui Ketua RW.

### 3) Fokus Masalah/Masalah Inti/Masalah Utama

Berdasarkan pada hasil identifikasi masalah yang telah diketahui penyebab serta akibat yang telah dirumuskan di atas, maka yang menjadi fokus masalah yakni kesulitan warga dalam menyampaikan aspirasi. Berikut identifikasi masalah dijelaskan dalam analisis pohon masalah pada gambar 2.4



Gambar 2.4 Pohon masalah analisis penataan lingkungan sosial

#### f Identifikasi Kebutuhan

Wadah komunikasi yang dapat menjadi perekat dan penghubung warga masyarakat dengan pihak RW.

#### g Identifikasi Potensi dan Sumber

##### 1) Potensi

Potensi yang ada di wilayah kelurahan Cimincrang dan dimanfaatkan untuk pemecahan masalah yaitu:

- a) Adanya kearifan lokal pada masyarakat yang berupa rasa gotong royong yang tinggi
- b) Antusiasme yang tinggi dari masyarakat dalam menerima perubahan.

## 2) Sistem Sumber

### a) Sistem Sumber Formal

Sistem sumber formal adalah keanggotaan internal organisasi atau asosiasi resmi yang dapat menyediakan bantuan atau layanan langsung kepada anggotanya. Sistem sumber formal juga dapat membantu anggota untuk memanfaatkan sistem sumber kemasyarakatan.

Sistem sumber formal yang ada pada Kelurahan Cimincrang adalah pemerintah Kota Bandung hingga pemerintah kelurahan, UIN Sunan Gunung Djati

### b) Sistem Sumber Informal

Sistem sumber informal adalah sumber yang dapat memberikan bantuan, baik dalam bentuk bantuan dukungan emosional dan afeksi maupun nasehat dan informasi. Penggunaan sistem sumber informal tidak menggunakan prosedur, bersifat tanpa pamrih, penuh persahabatan dan tidak ada latar belakang yang tidak baik.

Sistem sumber informal yang ada masyarakat Kelurahan Cimincrang dan pekerja sosial.

### c) Sistem Sumber Kemasyarakatan

Merupakan sumber yang dapat diakses oleh seluruh jenis dan lapisan masyarakat tanpa diharuskan adanya status keanggotaan. Dimana sistem sumber kemasyarakatan yang dapat diakses oleh perempuan rawan sosial ekonomi di Kelurahan Cimincrang adalah kantor Kelurahan Cimincrang, PKK, karang taruna, forum RW Kelurahan Cimincrang.

## 4 Rencana Intervensi

### a Latar Belakang

Proyek pembangunan kampus UIN Sunan Gunung Djati yang berada pada wilayah Kelurahan Cimincrang terkhusus wilayah RW 01 dan 02 sedang berlangsung, tentunya masyarakat merasakan dampak kegiatan proyek tersebut. Menurut penuturan saudara Rima selaku pemuda yang pernah terlibat dalam mengusulkan aspirasi terkait masalah proyek UIN menyampaikan, bahwa dalam menjalin komunikasi dengan pihak UIN Sunan Gunung Djati, aspirasi warga terhalang oleh kepentingan pihak pengurus RW yang berhubungan langsung, yakni pihak ketua RW 01 dan 02. hal ini berdampak pada kepercayaan warga kepada pihak RW menurun dan muncul kerenggangan hubungan.

Kekecewaan warga juga memicu terjadinya pertentangan dengan pihak Ketua RW yang terwujud pada keengganan dan ketidakpatuhan warga mengikuti amanah yang diberikan melalui ketua RW. Informasi yang didapatkan dari Ibu Dwi selaku tokoh masyarakat menuturkan bahwa pemuda pemudi dan beberapa warga tidak mau melaksanakan kegiatan yang diselenggarakan Ketua RW sebagai wujud protes akan pembatasan aspirasi warga.

Praktikan selanjutnya menemui ketua karang taruna RW 02 yakni bapak dan diperoleh informasi bahwa memang tidak ada wadah komunikasi rutin bagi warga dengan pemerintah setempat di wilayah mereka. Pertemuan dan komunikasi biasanya hanya dilaksanakan ketika melaksanakan kegiatan memperingati hari besar saja. karena adanya hambatan komunikasi tersebut diperlukan adanya wadah pertemuan rutin yang dapat menampung berbagai bentuk aspirasi warga dan bentuk komunikasi lainnya dan dapat menjadikan penguat hubungan dan kepercayaan masyarakat dengan pihak pengurus RW.

b Tujuan umum dan khusus

1) Tujuan Umum

Secara umum program ini bertujuan untuk memberikan wadah aspirasi bagi warga.

2) Tujuan Khusus

a) terciptanya komunikasi antara warga dan aparat desa yang baik sehingga segala bentuk permasalahan dan aspirasi dimengerti dan dilaksanakan dengan keputusan bersama.

b) Terjalinya hubungan yang erat antar warga dan aparat desa

c) Terbentuknya rasa saling percaya.

c Bentuk Kegiatan dan Program

1) Nama Program

Untuk pelaksanaan intervensi ini praktikan mengusulkan nama program “Pembentukan Wadah Komunikasi Rutin Warga: Rembug Warga Rutin Sadayana (rembug warna)”

2) Bentuk Kegiatan

Membentuk wadah pertemuan rutin yang dapat memfasilitasi warga dalam menjalin komunikasi dan menghubungkan aspirasinya kepada pihak pemerintah atau aparat desa.

d Sistem Partisipan

Sistem partisipan yang ada dalam program ini yaitu:

- 1 *Initiator System*, adalah pihak yang pertama kali melihat masalah. Dimana dalam program ini adalah pihak praktikan.
  - 2 *Change Agent System*, ialah pihak yang nantinya diberi tanggung jawab dalam mengatur perubahan yang akan dilakukan. Dalam program ini adalah pekerja sosial
  - 3 *Client Sistem*, merupakan pihak yang menjadi calon penerima pelayanan, baik secara langsung ataupun tidak. Dalam program ini ialah masyarakat di Kelurahan Cimincrang.
  - 4 *Support System*, adalah pihak yang memiliki perhatian akan keberhasilan dari perubahan program yakni pemerintah kelurahan, masyarakat, dan pekerja sosial
  - 5 *Controlling System*, pihak atau lembaga yang memiliki otoritas formal dan kekuasaan dalam menerima atau menolak perubahan. Dalam hal ini yakni Lurah Kelurahan Cimincrang
  - 6 *Implementing System*, pihak yang memiliki tugas rutin melaksanakan dan mengelola pelaksanaan perubahan Dalam program ini yaitu pekerja sosial, tim pelaksana
  - 7 *Target System* adalah individu , keluarga, struktur, kebijakan, dan praktik yang perlu di rubah agar para *client system* memperoleh manfaat yang diharapkan. dalam hal in target sistemnya ialah Ketua RW.
  - 8 *Action System*, Merupakan individu dari berbagai sistem yang berperan aktif dalam perancangan serta implementasi perubahan. Dalam hal ini ialah Pekerja sosial dan tim pelaksana.
- e Metode dan Teknik
- 1) Metode
 

Dalam program ini menggunakan metode COCD atau *community organization and community development*. Adapun penerapan metode ini digunakan untuk mengorganisasikan masyarakat serta pemangku kepentingan dalam penyelesaian masalah.
  - 2) Teknik
 

Dalam kegiatan yang akan dilaksanakan menggunakan teknik kolaborasi Pada Teknik ini dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan antar sistem-sistem terkait dan disepakati untuk dilakukannya perubahan. Kolaborasi terjalin antara pihak perangkat Desa yang dalam hal ini adalah Ketua RW 01 dan Ketua RW 02, warga RW 01 dan 02 Kelurahan Cimincrang, dan pekerja sosial.
- f Rencana Anggaran Biaya dan alat yang dibutuhkan

Adapun rencana anggaran biaya dan alat yang dibutuhkan selama pelaksanaan program dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.13 Rencana anggaran biaya program pembentukan wadah komunikasi rutin warga: rembug warga rutin sadayana (rembug warna)

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kertas plano	3	lembar	2.000	6.000
2	Bingkisan	20	orang/kegiatan	20.000	400.000
3	Snack peserta	20	orang/kegiatan	10.000	200.000
Jumlah					606.000

Pembuatan rancangan anggaran di atas mengacu pada pedoman yang diatur oleh Kementerian Keuangan pada Peraturan Menteri Keuangan RI No.83 /PMK.02/2022 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2023.

Adapun alat pendukung yang digunakan untuk menunjang dalam proses pelaksanaan pembentukan program ini dijelaskan pada tabel 2.14

Tabel 2.14 Alat penunjang pelaksanaan program pembentukan wadah komunikasi rutin warga: rembug warga rutin sadayana (rembug warna)

Alat	Jumlah	Keterangan
(1)	(2)	(3)
ATK	1 set	tersedia
LCD Proyektor	1 unit	tersedia
Layar Proyektor	1 unit	tersedia
Laptop	1 unit	tersedia
Sounds System	1 unit	tersedia

#### g Analisis Kelayakan Program

Adapun analisis kelayakan program ini menggunakan analisis SWOT yang dijelaskan pada matriks 2.4

Matriks 2.4 Analisis SWOT program pembentukan wadah komunikasi rutin warga: rembug warga rutin sadayana (rembug warna)

<p><b>Faktor Internal</b></p>	<p><b>Strength</b></p> <p>1) Adanya kesesuaian program dengan kebutuhan akan pemecahan masalah</p> <p>2) Keterbukaan masyarakat dalam proses perubahan</p>	<p><b>Weakness</b></p> <p>adanya kemungkinan rasa sungkan warga terhadap ketua RW</p>
<p><b>Faktor Eksternal</b></p> <p><b>Opportunities</b></p> <p>1) Belum adanya wadah komunikasi yang menampung aspirasi warga</p> <p>2) Memudahkan komunikasi antar pihak dalam membahas sebuah permasalahan ataupun kebutuhan yang terjadi pada kehidupan warga</p> <p>3) Adanya dukungan dari pihak kelurahan</p>	<p><b>Strategi SO</b></p> <p>Membentuk wadah komunikasi rutin</p>	<p><b>Strategi WO</b></p> <p>1) memperhatikan situasi dan kondisi, tempat yang nyaman, penyampaian pesan dengan mudah dan menarik sehingga tercapai kesepakatan.</p> <p>2) Menentukan tim perwakilan warga yang mengerti dan memahami karakter dari ketua RW</p>
<p><b>Threats</b></p> <p>adanya kemungkinan hambatan pengaturan waktu yang dapat menyesuaikan berbagai pihak yang terlibat</p>	<p><b>Strategi ST</b></p> <p>1) Menggunakan komunikasi yang efektif</p> <p>2) Mengutamakan kesepakatan musyawarah mufakat yang dapat diterima dari semua pihak</p>	<p><b>Strategi WT</b></p> <p>1) Menyusun Rencana strategis dengan mengutamakan komunikasi yang baik untuk meyakinkan ketua RW</p> <p>2) Mengutamakan Kepentingan bersama</p>

#### h Jadwal dan Langkah-langkah

##### 1) Pra Pelaksanaan

- a) Membentuk Tim pelaksana
- b) Identifikasi peserta kegiatan
- c) Menyusun rencana dan strategi yang digunakan
- d) Menentukan jadwal rencana aksi

##### 2) Pelaksanaan

Dalam proses pelaksanaan pekerja sosial berperan sebagai fasilitator dengan memfasilitasi adanya pertukaran informasi secara terbuka antara masing-masing pihak yang terlibat. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara penuh oleh tim pelaksana.

##### 3) Pasca Pelaksanaan

Dilaksanakannya kegiatan evaluasi dengan berorientasi pada hasil kesepakatan bersama, terbentuknya kerja sama antara pihak-pihak yang terlibat. Selama langkah-langkah dilaksanakan dari pra pelaksanaan hingga pasca pelaksanaan pekerja sosial memonitoring jalannya kegiatan.

## **E Profil Analisis Penanggulangan Bencana**

### 1 Gambaran Umum Masalah

Indonesia termasuk dalam negara dengan potensi ancaman bencana yang berisiko tinggi, bahkan berdasarkan the world risk index pada tahun 2019 Indonesia berada pada posisi ke-37 dari total 180 negara yang paling rentan terhadap bencana. Hal ini di pengaruhi oleh kondisi geografis, iklim hingga kondisi demografis. Secara geografis Indonesia yang terletak diantara dua lempengan besar yakni lempengan samudra Pasifik dan lempengan samudra Hindia. Kondisi ini mengakibatkan potensi terjadinya gempa di Indonesia tinggi, berdasarkan data BPS selama tahun 2021 terdapat 10.519 frekuensi gempa bumi di Indonesia. kondisi geografis lain adalah terbentangnya sabuk vulkanis dari wilayah Sumatra, Jawa, Nusa Tenggara dan di wilayah Sulawesi. Bentang kondisi geografis yang beragam di Indonesia seperti kondisi tanah yang berpotensi tanah longsor, fluktuasi, hingga banjir.

Struktur masyarakat dengan kondisi budaya, adat istiadat hingga kepercayaan yang sangat beragam menjadi khazanah kekayaan yang dimiliki Indonesia. Namun dengan jumlah penduduk yang terus meningkat namun tidak dibarengi dengan pembangunan yang merata, hal ini potensial terjadi adanya gesekan antar masyarakat. Faktor iklim

tropis dengan kondisi topografis di negara kita juga berisiko pada kekeringan, kebakaran hutan, banjir hingga tanah longsor.

Bandung menjadi salah satu wilayah yang berisiko tinggi terhadap gempa yang disebabkan adanya patahan atau sesar aktif lembang yang membentang sepanjang 29 kilometer. Selain itu kepadatan penduduk dengan segala aktivitasnya menjadikan beberapa wilayah di Bandung menjadi spot langganan banjir. Kepadatan penduduk serta aktivitasnya menjadikan banyak wilayah di Kota Bandung menjadi wilayah pemukiman yang padat penduduk, hal ini juga berpotensi pada terjadinya kebakaran pemukiman padat penduduk.

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana, pemerintah telah memiliki manajemen penanggulangan bencana terpadu, terkoordinasi dan secara menyeluruh yang meliputi kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Dimana program ini menjamin seluruh lapisan masyarakat terlindungi termasuk penduduk yang rentan dalam situasi bencana seperti anak, perempuan, dan remaja.

- 2 Tinjauan konsep/teori yang relevan dengan kasus/masalah kesejahteraan yang dipilih
  - a Bencana

Berdasarkan Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana diartikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan faktor alam dan/atau non alam ataupun faktor manusia sehingga menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Definisi dari WHO menyatakan bahwa bencana adalah kejadian yang mengganggu kondisi normal keberadaan dan menyebabkan tingkat penderitaan yang melebihi kapasitas penyesuaian komunitas yang terkena dampak.

WHO menerangkan bahwa bencana terjadi saat kerentanan bertemu dengan bahaya atau ancaman. Adapun penyebab yang mendasari kerentanan meliputi adanya kemiskinan, akses terbatas ke struktur kekuasaan, sumber daya, faktor usia, masyarakat yang memiliki penyakit dan kecacatan. Selain itu juga dikarenakan adanya tekanan yang bersifat dinamis yang bermula dari kurangnya institusi lokal, pendidikan, pelatihan, keterampilan yang sesuai, dan lain-lain. Faktor kerentanan dapat berawal dari



keadaan tidak aman seperti lingkungan fisik yang rapuh, lokasi berbahaya, dan bangunan berbahaya.

b Penanggulangan bencana

Menurut UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dapat didefinisikan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Pemerintah dan pemerintah daerah merupakan yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana. Pada dasarnya, rangkaian kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tiga tahapan, yaitu :

- 1) Pra bencana, yang meliputi :
  - a) Situasi tidak terjadi bencana
  - b) Situasi terdapat potensi terjadinya bencana
- 2) Tanggap darurat merupakan kegiatan yang dilakukan dalam situasi terjadi bencana dan kegiatannya meliputi :
  - a) Penyelamatan dan evakuasi korban dan harta benda
  - b) Pemenuhan kebutuhan dasar
  - c) Perlindungan
  - d) Pengurusan pengungsi penyelamatan
  - e) Pemulihan prasarana dan sarana
- 3) Pasca bencana merupakan kegiatan yang dilakukan setelah terjadi bencana dalam merupakan kegiatan pemulihan, kegiatannya meliputi:
  - a) Rehabilitasi
  - b) Rekonstruksi

c Pendidikan Kebencanaan

Pengetahuan kebencanaan penting bagi masyarakat, anak-anak hingga lanjut usia sehingga menjadi bekal pengetahuan berbagai informasi mengenai jenis bencana, tanda-tanda terjadinya bencana, perkiraan daerah jangkauan bencana prosedur penyelamatan diri dan berbagai informasi lain yang dibutuhkan masyarakat sebelum, saat dan sesudah terjadinya bencana.

Pendidikan kebencanaan adalah salah satu bentuk penyebaran pengetahuan kebencanaan yang menjadi solusi agar

masyarakat dapat mengurangi dampak bencana serta masyarakat dapat memiliki kemampuan tanggap dan sigap dalam situasi bencana. Terdapat berbagai macam bentuk pendidikan kebencanaan seperti penanggulangan bencana berbasis masyarakat, pendidikan kebencanaan untuk menuju masyarakat sadar bencana, serta kearifan lokal masyarakat dalam menangani bencana (Preston, 2012; Setyowati, 2007).

### 3 Asesmen

#### a Identifikasi Masalah

##### 1) Penyebab Masalah

- a) masyarakat mengetahui akan potensi ragam bencana alam yang dapat terjadi di wilayah Kelurahan Cimincrang, namun dikarenakan ragam bencana alam tersebut belum pernah terjadi di wilayah tempat tinggal mereka, menjadikan masyarakat tidak memiliki kekhawatiran yang menjadikan masyarakat berpandangan bahwa mempelajari situasi bencana belum terlalu penting.
- b) Tidak adanya edukasi kebencanaan/penanggulangan bencana bagi anak sebagai kelompok yang rentan dalam situasi bencana. edukasi kebencanaan Sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam menghadapi situasi bencana padahal jumlah penduduk di Kelurahan Cimincrang dalam katagori anak terhitung tinggi. dari lembaga pendidikan, keluarga, masyarakat, ataupun lembaga terkait belum pernah memberikan edukasi kebencanaan baik mitigasi bencana, kesiapsiagaan bencana, hingga prosedur penanggulangan jika terjadinya bencana pada anak.
- c) Hampir seluruh anak-anak usia 6-18 yang ditemui praktikan di kelurahan Cimincrang tidak mengetahui prosedur penanggulangan jika terjadi bencana.

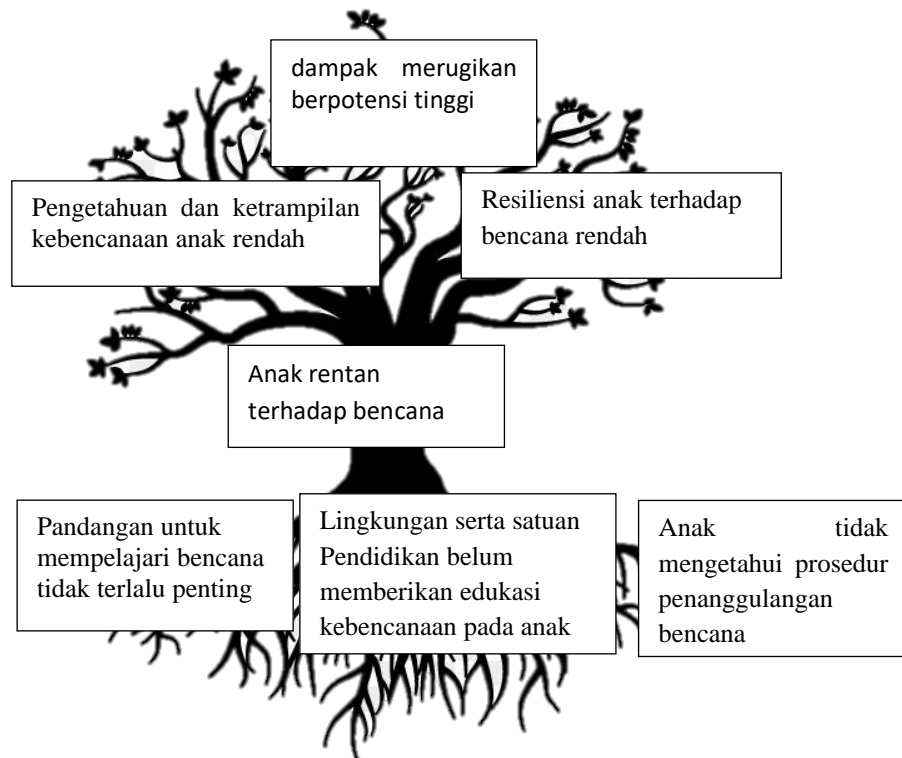
##### 2) Dampak Masalah

- a) Pengetahuan dan keterampilan anak mengenai kebencanaan rendah. Hal ini menjadikan tingkat kerentanan anak-anak terhadap ancaman bencana alam cukup tinggi karena tidak adanya pengetahuan yang anak miliki mengenai apa yang harus dilakukan pada saat terjadinya bencana, sebelum bencana hingga setelah terjadinya bencana.

- b) Dampak yang merugikan pada situasi bencana cenderung berpotensi tinggi seperti jumlah korban dan kerugian terutama dampak yang merugikan pada anak.
  - c) Resiliensi anak terhadap bencana rendah. Ketangguhan anak dalam situasi bencana rendah.
- 3) Fokus Masalah/Masalah Inti/Masalah Utama

Berdasarkan analisis masalah yang diuraikan dalam penyebab dan dampaknya maka dapat dirumuskan fokus masalah yakni tinggi-nya kerentanan anak terhadap bencana akibat rendahnya pengetahuan dan ketrampilan anak mengenai kebencanaan.

Berikut ini identifikasi masalah diuraikan dalam analisis pohon masalah pada gambar 2.5



Gambar 2.5 Pohon masalah analisis penanggulangan bencana

b Identifikasi Kebutuhan

Adapun kebutuhan yang diperlukan berdasarkan analisis isu masalah yang ada adalah:

- 1) Terselenggaranya program edukasi kebencanaan kepada anak
- 2) Peningkatan kesadaran akan perlunya edukasi kebencanaan
- 3) meningkatnya pengetahuan serta ketrampilan anak dalam situasi bencana

c Identifikasi Potensi dan Sumber

1) Potensi

Berdasar isu masalah mengenai belum adanya edukasi kebencanaan untuk anak di Kecamatan Cimincrang terdapat berbagai potensi yang bisa digunakan dalam proses penyelesaian masalah tersebut. Adapun potensi yang ada sebagai berikut:

- a) Adanya program Kemendikbud yang mendorong sekolah untuk melaksanakan edukasi kebencanaan pada siswanya
- b) Beberapa instansi pemerintah memiliki program mengenai penanggulangan bencana, seperti dari pemadam kebakaran Kota Bandung, pemkot Bandung, hingga BPBD.
- c) Terdapat berbagai komunitas relawan dan pakar yang tergabung dalam forum pengurangan risiko bencana di Kota Bandung.

2) Sistem Sumber

a Sistem Sumber Formal

Sistem sumber formal adalah keanggotaan internal organisasi atau asosiasi resmi yang dapat menyediakan bantuan atau layanan langsung kepada anggotanya. Sistem sumber formal juga dapat membantu anggota untuk memanfaatkan sistem sumber kemasyarakatan.

Sistem sumber formal yang ada pada Kelurahan Cimincrang adalah pemerintah Kota Bandung hingga pemerintah kelurahan.

b Sistem Sumber Informal

Sistem sumber informal adalah sumber yang dapat memberikan bantuan, baik dalam bentuk bantuan dukungan emosional dan afeksi maupun nasehat dan informasi. Penggunaan sistem sumber informal tidak menggunakan prosedur, bersifat tanpa pamrih, penuh persahabatan dan tidak ada latar belakang yang tidak baik.

Sistem sumber informal yang ada masyarakat Kelurahan Cimincrang dan pekerja sosial.

c Sistem Sumber Kemasyarakatan

Merupakan sumber yang dapat diakses oleh seluruh jenis dan lapisan masyarakat tanpa diharuskan adanya status keanggotaan. Dimana sistem sumber kemasyarakatan yang dapat diakses oleh perempuan rawan sosial ekonomi di Kelurahan Cimincrang adalah

kantor kelurahan Cimincrang, PKK, karang taruna, Dinas Sosial Kota Bandung, Pemerintah Kota Bandung, BPBD.

#### 4 Rencana Intervensi

##### a Latar Belakang

Terdapat potensi terjadinya ragam bencana alam di wilayah Kelurahan Cimincrang diantaranya banjir, kebakaran di wilayah padat pemukiman, bencana hidrometeorologi, serta potensi terjadinya gempa bumi. Potensi bencana yang ada tidak menjadikan masyarakat sadar akan pentingnya edukasi kebencanaan dengan dalih jarang bahkan satu diantaranya belum pernah terjadi, terkecuali banjir yang sering terjadi dalam skala yang kecil. Hal ini menimbulkan ketahanan masyarakat pada situasi bencana rendah dan risiko bencana menjadi tinggi.

Kelurahan Cimincrang yang memiliki penduduk pada usia anak tergolong tinggi dengan jumlah kurang lebih 750 anak belum pernah ada pelaksanaan edukasi kebencanaan untuk anak, Sedangkan anak merupakan golongan yang rentan terhadap bencana. Dari informasi yang didapat dari perangkat kelurahan diketahui bahwa pelatihan yang pernah dilaksanakan di Kelurahan Cimincrang hanya ditujukan untuk warga dewasa dari pihak pemadam kebakaran mengenai pentingnya menjaga dan penyelamatan dokumen penting agar terlindung dari bencana kebakaran. Berdasarkan informasi yang disampaikan Ibu Dwi selaku pemilik kelompok belajar menyampaikan bahwa memang sedari dulu tidak ada pendidikan kebencanaan yang ditujukan untuk anak-anak. Informasi serupa juga diketahui dari orang tua serta pelajar di Kelurahan Cimincrang

Sebagai upaya perlindungan anak terhadap situasi bencana, edukasi kebencanaan untuk anak sangat penting untuk meningkatkan ketahanan anak serta resiliensinya terhadap situasi bencana. Salah satunya edukasi bencana mengenalkan anak mengenai apa itu bencana, apa faktor yang menimbulkan bencana, mengapa bencana terjadi, mengenali tanda-tanda terjadinya bencana, dan mengetahui apa yang harus dilakukan pada saat situasi bencana. edukasi bencana ini menjadikan anak memiliki pengetahuan dan ketrampilan risiko bencana dan tanggap bencana sehingga risiko bencana akan berkurang juga.

##### b Tujuan umum dan khusus

###### 1) Tujuan Umum

Program ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta ketrampilan anak dalam menghadapi situasi bencana.

- 2) Tujuan Khusus
  - a) Meningkatkan ketahanan anak dalam situasi bencana
  - b) Meningkatkan resiliensi anak dalam situasi bencana
  - c) Memberikan kesadaran akan risiko bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan anak pada situasi bencana
  - d) Melibatkan anak dalam mengurangi dampak bencana sedini mungkin
- c Bentuk Kegiatan dan Program
  - 1) Nama Program
 

Nama program intervensi yang dirancang praktikan adalah sosialisasi dan pelatihan edukasi kebencanaan anak sigap dan tanggap bencana
  - 2) Bentuk Kegiatan
    - a) Menjalin kerja sama dengan pihak BPBD, dinas pendidikan, serta ahli bidang kebencanaan.
    - b) Sosialisasi dan pelatihan edukasi kebencanaan pada satuan pendidikan dan arahan untuk menjadwalkan edukasi kebencanaan pada peserta didik secara bertahap dan rutin.
- d Sistem Partisipan
 

Adapun sistem partisipan yang digunakan dalam program intervensi yang dirancang praktikan adalah sebagai berikut:

  - 1) *Initiator System*, adalah pihak yang pertama kali melihat masalah. Dimana dalam program ini adalah pihak praktikan.
  - 2) *Change Agent System*, ialah pihak yang nantinya diberi tanggung jawab dalam mengatur perubahan yang akan dilakukan. Dalam program ini adalah pekerja sosial
  - 3) *Client Sistem*, merupakan pihak yang menjadi calon penerima pelayanan, baik secara langsung ataupun tidak. Dalam program ini ialah masyarakat di Kelurahan Cimincrang.
  - 4) *Support System*, adalah pihak yang memiliki perhatian akan keberhasilan dari perubahan program yakni pemerintah kelurahan, masyarakat, BPBD, Dinas Pendidikan, dan pekerja sosial
  - 5) *Controlling System*, pihak atau lembaga yang memiliki otoritas formal dan kekuasaan dalam menerima atau menolak perubahan. Dalam hal ini yakni Lurah Kelurahan Cimincrang
  - 6) *Implementing System*, pihak yang memiliki tugas rutin melaksanakan dan mengelola pelaksanaan perubahan Dalam program ini yaitu pekerja sosial, pemerintah tingkat kelurahan, Tim pelaksana, BPBD Kota Bandung.

- 7) *Target System* adalah individu , keluarga, struktur, kebijakan, dan praktik yang perlu di rubah agar para client sistem memperoleh manfaat yang diharapkan. dalam hal in target sistemnya ialah kebijakan pembangunan daerah pinggiran kota serta pemangku kepentingan.
  - 8) *Action System*, Merupakan individu dari berbagai sistem yang berperan aktif dalam perancangan serta implementasi perubahan. Dalam hal ini ialah Pekerja sosial, tim pelaksana, BPBD Kota Bandung, Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- e Metode dan Teknik
- 1) Metode
 

Metode yang digunakan dalam program ini adalah *Community Organization dan Community Development (COCD)*. dalam metode ini memandang bahwa perlunya keterlibatan kolektif anggota komunitas. *Community Development* atau diketahui juga dengan istilah pengembangan masyarakat lokal dalam hal ini untuk dapat melaksanakan program. Dan *Community Organization* untuk mengatur pihak-pihak yang dapat terlibat dalam pelaksanaan program.
  - 2) Teknik
 

Teknik yang digunakan dalam program ini adalah kampanye dan kolaborasi. Dimana dalam teknik kampanye dilaksanakan pelatihan yang ditujukan untuk memberikan edukasi pada satuan pendidikan dan pemerintah Kelurahan Cimincrang yang nantinya akan diterapkan dalam mengedukasi anak-anak. Teknik kolaborasi dilaksanakan antara pekerja sosial, BPBD Kota Bandung, Dinas Pendidikan Kota Bandung, Lembaga Pendidikan di wilayah Kelurahan Cimincrang, Pemerintah Kelurahan Cimincrang serta Relawan Kebencanaan.
- f Rencana Anggaran Biaya dan alat yang dibutuhkan
- Adapun rencana anggaran biaya dan alat yang dibutuhkan selama pelaksanaan program dijelaskan pada tabel 2.15

Tabel 2.15 Rencana anggaran biaya program sosialisasi dan pelatihan edukasi kebencanaan anak sigap dan tanggap bencana

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Honorarium Narasumber BPBD kota Bandung	1	orang/jam	1.000.000	1.000.000
2.	Honorarium Narasumber Dinas Pendidikan Kota Bandung	1	orang/jam	1.000.000	1.000.000
3.	Konsumsi Narasumber	2	orang/kegiatan	45.000	90.000
4.	Konsumsi peserta	20	orang/kegiatan	25.000	500.000
5.	Konsumsi Relawan Kebencanaan	4	orang	25.000	100.000
6.	Snack Narasumber	2	orang/kegiatan	20.000	40.000
7.	Snack peserta	20	orang/kegiatan	10.000	200.000
Jumlah					4.290.000

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui Rencana Anggaran Biaya Program Sosialisasi dan Pelatihan Edukasi Kebencanaan Anak Sigap dan Tanggap Bencana. Adapun anggaran di atas mengacu pada pedoman yang diatur oleh Kementerian Keuangan pada Peraturan Menteri Keuangan RI No.83 /PMK.02/2022 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2023.

Adapun alat yang digunakan untuk menunjang Program Sosialisasi dan Pelatihan Edukasi Kebencanaan Anak Sigap dan Tanggap Bencana dijelaskan pada Tabel 2.16

Tabel 2.16 Alat penunjang program sosialisasi dan pelatihan edukasi kebencanaan anak sigap dan tanggap bencana

No.	Alat	Jumlah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ATK	1 set	tersedia
2.	LCD Proyektor	1 unit	tersedia
3.	Laptop	1 unit	tersedia
4.	Sounds System	1 unit	tersedia



g Analisis Kelayakan Program

Adapun dalam menentukan analisis kelayakan program rencana intervensi ini menggunakan analisis SWOT Menurut Fredi Rangkuti (2004: 18), Analisis SWOT merupakan identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Berikut ini analisis kelayakan program dijabarkan dalam matriks 2.5

Matriks 2.5 Analisis SWOT program sosialisasi dan pelatihan edukasi kebencanaan anak sigap dan tanggap bencana

<p><b>Faktor Internal</b></p> <p><b>Faktor Eksternal</b></p>	<p><b>Strength</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dukungan dari pihak kelurahan</li> <li>2) Terdapat berbagai instansi yang dapat dijadikan rekan</li> <li>3) Terdapat satuan pendidikan dan kegiatan masyarakat yang dapat dijadikan wadah penyelenggaraan</li> </ol>	<p><b>Weakness</b></p> <p>perlunya waktu yang cukup lama untuk berkoordinasi dan mencapai kesepakatan</p>
<p><b>Opportunities</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Terdapat kesesuaian program dengan kebutuhan kelompok sasaran</li> <li>2) Terdapat narasumber yang sesuai dengan bidang program yang dirancang</li> </ol>	<p><b>Strategi SO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Berkolaborasi dengan berbagai pihak</li> <li>2) Merencanakan kegiatan yang diinovasikan menyesuaikan dengan anak-anak</li> </ol>	<p><b>Strategi WO</b></p> <p>berdasarkan waktu secara bertahap dengan pemberian pelatihan/edukasi yang mudah dipahami</p>
<p><b>Threats</b></p> <p>Adanya kemungkinan kurangnya SDM, pada satuan pendidikan dan pada wadah masyarakat yang dapat melaksanakan kegiatan secara rutin</p>	<p><b>Strategi ST</b></p> <p>Perlu adanya rencana berkelanjutan untuk wadah konsultasi rutin</p>	<p><b>Strategi WT</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Membuat jadwal rutin beserta dengan jadwal pematerinya baik dari satuan pendidikan atau diisi dari instansi lain ataupun relawan.</li> </ol>

- h Jadwal dan Langkah-langkah
- 1) Menjalinkan kerja sama dengan BPBD, Dinas Pendidikan dan relawan kebencanaan
    - a) Tahap Persiapan
      - (1) Menyusun proposal kegiatan
      - (2) Identifikasi peserta kegiatan yakni terdiri dari lembaga pendidikan yang berada di wilayah Kelurahan Cimincrang dan pemerintah Kelurahan Cimincrang.
      - (3) Menentukan berbagai sistem sumber
      - (4) Menyusun dan mengirimkan surat permohonan kepada pihak BPBD Kota Bandung, Pihak Dinas Pendidikan, untuk menjadi sistem sumber, narasumber dan menjalin kerja sama.
      - (5) mengatur jadwal pertemuan untuk menjalin relasi dengan lembaga
    - b) Tahap Pelaksanaan
 

Pada kegiatan ini praktikan bersama tim pelaksana melakukan pertemuan dan diskusi bersama berbagai pihak yang telah ditentukan. Dalam diskusi bersama dengan sistem sumber pembahasan yang disampaikan:

      - (1) Permasalahan yang ditemukan praktikan di Kelurahan Cimincrang mengenai kerentanan anak
      - (2) Rencana kegiatan intervensi yang telah disusun praktikan
      - (3) Menentukan teknik dan materi yang akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan
      - (4) Menentukan jadwal pelaksanaan
    - c) Tahap Pengakhiran
 

Tahap akhir dalam kegiatan menjalin kerja sama dengan sistem sumber maka dibuatlah penyusunan laporan pertanggung jawaban.
  - 2) Sosialisasi dan pelatihan edukasi kebencanaan pada satuan pendidikan
    - a) Pra Pelaksanaan
      - (1) Menyusun proposal kegiatan
      - (2) Mengirimkan proposal kegiatan
      - (3) Penyiapan segala kebutuhan untuk pelaksanaan program
      - (4) Penyiapan lokasi pelaksanaan program
    - b) Pelaksanaan

Pada pelaksanaan sosialisasi serta pelatihan ini dilaksanakan dengan rincian kegiatan dijelaskan pada tabel 2.17

Tabel 2.17 Jadwal kegiatan sosialisasi serta pelatihan program sosialisasi dan pelatihan edukasi kebencanaan anak sigap dan tanggap bencana

No.	Waktu (WIB)	Kegiatan	Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	08.30-09.00	Persiapan	Panitia
2.	09-00-09.10	Pembukaan	MC
3.	09.10-09.15	Pembacaan Doa	Acara
4.	09.15-09.20	Menyanyikan lagu indonesia raya	MC
5.	09.20-09.30	Sambutan	Ketua pelaksana
6.	09.30-10.15	Pemaparan materi 1	Narasumber dari Dinas pendidikan
7.	10.15-10.35	Diskusi	MC dan narasumber
8.	10.35-11.15	Pemaparan Materi 2	Narasumber BPBD Kota Bandung
9.	11.15-12.00	Try out peserta pelatihan	Relawan kebencanaan
10.	12.00-12.30	ISHOMA	
11.	12-30-13.10	Pemaparan materi 3	Narasumber BPBD
12.	12.10-13.50	Diskusi dan try out	Narasumber BPBD dan Relawan Kebencanaan
13.		Penentuan jadwal pelatihan lanjutan	
14.	13.40-13.45	Penutupan	MC

c) Pasca Pelaksanaan

Setelah dilakukan kegiatan kemudian dilaksanakan proses evaluasi yang dilaksanakan dan dipimpin oleh Ketua pelaksana, BPBD Kota Bandung, Dinas Pendidikan Kota Bandung dan pekerja Sosial. Dimana sebelumnya dilakukan monitoring dari pra pelaksanaan hingga pelaksanaan dan disampaikan hasilnya pada proses evaluasi.

## **BAB III**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **A Kesimpulan**

Praktikum Laboratorium Program Studi Pelindungan dan Pemberdayaan Sosial ditujukan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan mahasiswa terkait lima profil lulusan Program Studi Pelindungan dan Pemberdayaan Sosial. Mahasiswa melaksanakan analisis terkait lima profil lulusan yakni Analisis Jaminan Sosial, Analisis Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial, Analisis Pemberdayaan Sosial, Analisis Penataan Lingkungan Sosial, dan Analisis Penanggulangan Bencana. Dalam menganalisis setiap isu masalah ditemukan hasil asesmen masalah dan kebutuhan yang berbeda, maka pada rencana intervensi disesuaikan dengan hasil asesmen dan potensi terkait yang dapat dimanfaatkan.

Di bawah ini rangkuman hasil analisis praktikan terhadap lima profil lulusan Program Studi Pelindungan dan Pemberdayaan Sosial yang diperoleh tempat praktikum di wilayah Kelurahan Cimincrang:

##### **1 Analisis Jaminan Sosial**

Praktikan memilih isu masalah program 'Paguyuban' yang merupakan bentuk jaminan sosial yang berbasis masyarakat, dimana dalam program paguyuban yang difokuskan pada RW 02 terdapat masalah manajemen pengelolaan program yang belum terorganisir dengan baik. Masalah ini diakibatkan kurangnya kesadaran mengenai pentingnya program paguyuban bagi perlindungan masyarakat sendiri, dan hal ini juga menjadikan pihak pengelola berpendapat tidak perlu melakukan penarikan iuran secara rutin. Dari penyebab tersebut berdampak pada hambatan berjalanya program berupa keuangan paguyuban minus, program vakum atau tidak berjalan dalam kurun waktu tertentu. Dari masalah tersebut praktikan merumuskan rencana intervensi melalui program bina paguyuban yang melakukan Pembinaan terkait tata kelola atau manajemen pengelolaan program paguyuban kepada pihak pengelola program paguyuban dan stake holder terkait dan sosialisasi mengenai kemanfaatan program paguyuban kepada masyarakat.

##### **2 Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial**

Pada profil ini praktikan memilih isu masalah pada program swadaya masyarakat untuk lansia terlantar di RW 02 yang mengalami kendala pada pendaan karena keterbatasan pengetahuan dalam menjalin kemitraan. Hal ini disebabkan

karena keterbatasan dana yang diperoleh tidak berbanding lurus dengan dana yang dibutuhkan serta ketidaktahuan masyarakat mengenai program-program dari lembaga lain yang dapat dijadikan mitra dalam swadaya untuk lansia terlantar. Akibatnya program terancam tidak dapat berlanjut sehingga perlindungan bagi lansia terlantar juga tidak bisa terwujud. Dari analisis tersebut praktikan merencanakan program intervensi berupa pengembangan strategi kemitraan untuk lansia terlindungi’

### 3 Analis Pemberdayaan Sosial

Profil analisis pemberdayaan sosial praktikan menganalisis isu mengenai keterbatasan akses perempuan rawan sosial ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Hal ini disebabkan karena tidak ada penghasilan atau penghasilan yang ada tidak dapat memenuhi kebutuhan yang mengakibatkan pilihan perempuan untuk meminjam pada bank emok. Hal itu berdampak pada PRSE yang terlilit hutang dan kerentanan ekonomi keluarga bertambah tinggi. Kemudian praktikan merencanakan intervensi sebagai upaya penyelesaian masalah dengan program pemberdayaan perempuan mandiri bersama melalui pembentukan koperasi untuk meningkatkan produktivitas perempuan.

### 4 Analis Penataan Lingkungan Sosial

Praktikan menganalisis sebuah isu mengenai kesulitan warga dalam menyampaikan aspirasi yang disebabkan karena kepentingan dari pihak Ketua RW yang membatasi aspirasi warga dan tidak adanya wadah komunikasi rutin bagi warga. Dampak dari masalah tersebut berupa timbulnya kekecewaan masyarakat dan ketidakpercayaan terhadap ketua RW sehingga menimbulkan ketidakpatuhan warga sebagai wujud kekecewaan. Dari analisis masalah tersebut praktikan merencanakan penyelesaian masalah berupa program pembentukan wadah komunikasi rutin warga: rebug warga rutin sadayana (rebug warna)

### 5 Analis Penanggulangan Bencana

Pada profil ini praktikan memilih isu mengenai kerentanan anak terhadap bencana alam yang disebabkan karena terdapat potensi bencana alam yang mungkin terjadi tidak dibarengi dengan pemahaman dan ketrampilan dalam situasi bencana, berdampak dengan masalah tersebut di wilayah Kelurahan Cimincrang populasi warga kategori anak cukup banyak. Hal ini berdampak pada tingkat resiliensi anak terhadap bencana rendah. Sebagai upaya pemecahan masalah praktikan mengusulkan program sosialisasi dan pelatihan edukasi kebencanaan ‘anak sigap dan tanggap bencana’

## **B Rekomendasi**

Berdasarkan pelaksanaan praktikum laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial yang dilakukan praktikan, maka dirumuskan rekomendasi sebagai berikut

- 1 Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial
  - a Pemberian pembekalan terkait keseluruhan pelaksanaan praktikum sebelum semester pelaksanaan praktikum, dapat berupa praktik lapangan percobaan praktikum yang disesuaikan dengan ketentuan praktikum. sehingga saat pelaksanaan praktikum mahasiswa dapat langsung berpraktik dengan tepat.
  - b Penyampaian informasi diharapkan dapat lebih akurat dan jarak penyampaian informasi dengan berlakunya informasi tersebut diharapkan berada pada waktu yang cukup luang sehingga mahasiswa lebih dapat menyiapkan secara matang.

- 2 Politeknik Kesejahteraan Sosial

Meningkatkan efektivitas pengajaran terkhusus terkait mata kuliah yang berhubungan dengan lima profil lulusan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial diharapkan dilaksanakan sebelum kegiatan praktikum laboratorium.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, HA (2015). Rukun Kematian: Kearifan Lokal dan Modal Sosial bagi Kerukunan Umat Beragama di Kota Bandar Lampung. *Harmoni* , 14 (1), 53-66.
- Development Bank, A. (n.d.). *OUR FRAMEWORK Policies and Strategies SOCIAL PROTECTION*. <http://www.adb.org/Publications>
- Dwijayanti, D. (2022, December). Pentingnya Pembelajaran Mitigasi Bencana untuk Anak Usia Dini di Indonesia: Sebuah Tinjauan Literatur. In *Annual Conference on Islamic Early Childhood Education (ACIECE)* (Vol. 6, pp. 15-22).
- Istriyani, R., Rizal, D. A., & Bahri, M. S. MANIFESTASI JARING PENGAMAN SOSIAL ATASI MASALAH SOSIAL EKONOMI AKIBAT COVID-19 PADA MASYARAKAT KABUPATEN SLEMAN.
- Khoirudin, R. (2019). Wanita Rawan Sosial Ekonomi Di Kecamatan Semin, Gunungkidul. *Elastisitas-Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 123-133.
- Larasati, L., & Setiawan, R. (2022). Perilaku Meminjam Masyarakat Pengguna Jasa Bank Keliling. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 10810-10817.
- Miftah, M. (2022). Pemberdayaan Perempuan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan: Dampak terhadap Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung. *Jurnal Education and development*, 10(1), 445-450.
- Muhtar, M. (2017). Peningkatan Layanan Sosial Bagi Keluarga Miskin Terhadap Program Perlindungan Sosial Melalui Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 3(1).
- Mukhtaliana, F. (2020). *Analisis permintaan kredit pada bank keliling dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sidoarjo* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). (2009). Promoting pro-poor growth: Social protection.
- Peraturan Kementrian Keuangan Nomor 60/PMK.02/2022 Tahun 2022 tentang Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD
- Purba, Y. A., Aini, Y. N., Asiati, D., & Ngadi, N. (2020). Kesenjangan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia: Analisis Data Sakernas 2018. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 15(2), 155-172.








- Purnama, A. (2018). Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi melalui Peningkatan Kesejahteraan Keluarga. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 17(4), 319-328.
- Rangkuti, F. (2004). SWOT Analysis of Business Case Dissecting Techniques, Jakarta, PT. Gramedia Main Library, 18.
- Sentano, K. (1982). *Jaminan Sosial Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Mutiara, Jakarta.
- Simamora, Y. A., Yuliani, D., & Wardhani, D. T. (2019). Hardiness Perempuan Rawan Sosial Ekonomi dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Di Kelurahan Sukapura Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial (Lindayasos)*, 1(2).
- Soerjono, S. (2002). Teori peranan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Specht, H. (1974). Allen Pincus and Anne Minahan," Social Work Practice: Model and Method"(Book Review). *Social Service Review*, 48(2), 296.
- Sriyana, S. (2021). *Masalah sosial kemiskinan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial*. CV Literasi Nusantara Abadi.
- Suharto, E. (2006, October). Kebijakan Perlindungan Sosial bagi Kelompok Rentan dan Kurang Beruntung. In *Makalah disampaikan pada Seminar "Perlindungan Sosial bagi Kelompok Rentan dan Kurang Beruntung: Analisis Kebijakan Perspektif Ketahanan Sosial Masyarakat" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial Republik Indonesia di Jakarta (Vol. 2)*.
- Suliyandingsih, W. (2012). Ketangguhan Mental Anak Dalam Menghadapi Bencana. *Jurnal Dialog dan Penanggulangan Bencana*, 3(1), 25-34.
- Sumaryana, A. (2011). Pengaruh Lingkungan Sosial terhadap Efektifitas Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 11 (01), 50-58.
- Suparjan, S. (2010). Jaminan Sosial Berbasis Komunitas: Tanggapan Atas Kegagalan Negara dalam Penyediaan Jaminan Kesejahteraan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 13 (3), 375-39.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang
- Wahab Lubis, A. (2022). Dana rukun kematian perspektif takaful mikro (studi kasus Desa Gunungronggo Kabupaten Malang). *Eqien-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10(1), 316-325.

## LAMPIRAN

### Lampiran. 1 Dokumentasi pelaksanaan bimbingan, pra lapangan dan supervisi

No.	Tanggal	Kegiatan	Dokumentasi
1	27 Januari 2023	Bimbingan pertama dengan dosen pembimbing	
2	3 Februari 2023	Bimbingan kedua via zoom dengan dosen pembimbing	
3	8 Februari 2023, 07.45 WIB	Pelepasan Praktikan Oleh Direktur Poltekesos Bandung	
4	8 februari 2023, 14.30 WIB	Penerimaan Mahasiswa Praktikan di kantor Kecamatan Gedebage	

5	2 maret 2023	Supervisi lapangan oleh Dosen Pembimbing	
6	16 Maret 2023	Bimbingan ketiga	
7	27 Maret 2023	Bimbingan Kelima	
8	31 Maret 2023, jam 9 pagi	Supervisi Lembaga di Kecamatan	
9	18 April 2023	Bimbingan ke enam	

**Lampiran. 2 Dokumentasi kegiatan pembekalan**

No.	Tanggal	Kegiatan	Dokumentasi
1	2 Februari 2023	Pembekalan Profil Analis Jaminan Sosial dengan narasumber Ibu Gayatri waditra Nirwesti, ME.	
2	22 Februari 2023	Pembekalan Profil Analis Sumber Dana Bantuan Sosial oleh narasumber Bapak Tonton Hartanto	
3	8 Maret 2023	Pembekalan Profil Analis Pemberdayaan Sosial oleh Bapak Samsul Maarif selaku Project Manager Yayasan Usaha Mulia	
4	24 Maret 2023	Pembekalan Profil Analis Penataan Lingkungan Sosial oleh narasumber Bapak Ade Reno , AKS.,MSW selaku CEO Islamic Relief Indonesia	 <p>GPS Map Camera Kecamatan Coblong, Jawa Barat, Indonesia 4JH9+2MJ, Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40135, Indonesia 24/03/2023 09:16 AM GMT +07:00</p>

5	5 April 2023	Pembekalan Profil Analisis Penanggulangan Bencana oleh Bapak Mohd Robi Amri selaku Perencana Ahli Madya BNPB Jakarta	
---	-----------------	---	--

### Lampiran. 3 Dokumentasi kegiatan lapangan

No.	Tanggal	Kegiatan	Dokumentasi
1.	9 Februari 2023	Mengunjungi Kegiatan Posyandu	
2.	10 Februari 2023	Wawancara dengan Sekretaris Kelurahan untuk Isu Jaminan Sosial	
3.	16 Februari 2023	Wawancara dengan Ibu RW 02 dan 01 Mengetahui adanya kegiatan pengumpulan dana Paguyuban/iuran kematian	
4.	1 Februari 2023	bersama ketua RW 02, Ketua Forum RW mengetahui swadaya oleh masyarakat untuk lansia terlantar dan permasalahannya	

5.	7 Maret 2023	Validasi dan Menyusun rencana pemecahan masalah dengan Ibu Dwi selaku pengelola dan swadaya untuk lansia terlantar	
6.	15 maret 2023	Wawancara dengan Abah Odang mengenai PRSE yang perlu diberdayakan	
7.	16 Maret 2023	Melakukan MPA bersama ibu-ibu RW 02 sebagai partisipasi mereka dalam pemecahan masalah	
8.	26 Maret 2023	Wawancara dengan bapak RT mengenai pembangunan UIN	
9.	28 Maret 2023	Diskusi dengan Ibu-ibu dan pemuda RW 02 dan 01 mengenai upaya menyampaikan aspirasi kepada ketua RW	

10.	6 April 2023	Diskusi dengan perangkat desa mengenai berbagai hal edukasi kebencanaan yang pernah dan belum pernah dilaksanakan	
11.	8 April 2023	Diskusi informal dengan anak-anak serta ibu-ibu mengenai pengetahuan kebencanaan untuk anak	
12.	14 April 2023	Lokakarya yang dilakan di kantor kelurahan	